

**PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, BELANJA DAERAH,  
TINGKAT KETERGANTUNGAN, TINGKAT KEMAKMURAN, DAN  
*LEVERAGE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH  
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019-2021**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Oleh:**

**LINDA KUSUMANINGTYAS  
NIM. 18.52.21.127**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA  
2023**

**PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, BELANJA DAERAH,  
TINGKAT KETERGANTUNGAN, TINGKAT KEMAKMURAN, DAN  
LEVERAGE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGA TAHUN 2019-2021**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna**

**Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**

**Oleh :**

**LINDA KUSUMANINGTYAS**  
NIM. 18.52.21.127

**Surakarta, 13 April 2023**

**Disetujui dan disahkan oleh :**

**Dosen Pembimbing Skripsi**



**Anim Rahmayati, S.E.I., M.Si.**  
NIP.19841008 201403 2 005

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : LINDA KUSUMANINGTYAS

NIM : 18.52.21.127

PRODI : AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul "PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, BELANJA DAERAH, TINGKAT KETERGANTUNGAN, TINGKAT KEMAKMURAN, DAN *LEVERAGE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019-2021".

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 13 April 2023



(Linda Kusumaningtyas)

## SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : LINDA KUSUMANINGTYAS

NIM : 18.52.21.127

PRODI : AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Terkait penelitian saya yang berjudul "PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, BELANJA DAERAH, TINGKAT KETERGANTUNGAN, TINGKAT KEMAKMURAN, DAN *LEVERAGE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019-2021".

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya benar-benar telah melakukan penelitian dan mengambil data. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagai mana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 13 April 2023



(Linda Kusumaningtyas)

Anim Rahmayati, SEI,M.Si.  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Sdr : Linda Kusumaningtyas

Kepada Yang Terhormat,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Linda Kusumaningtyas NIM: 18.52.21.127 yang berjudul :

“PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, BELANJA DAERAH, TINGKAT KETERGANTUNGAN, TINGKAT KEMAKMURAN, DAN *LEVERAGE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019-2021”.

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) dalam bidang ilmu Akuntansi Syariah. Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 13 April 2023  
Dosen Pembimbing Skripsi



Anim Rahmayati, S.E.I., M.Si.

NIP.19841008 201403 2 005

**PENGESAHAN**

**PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, BELANJA DAERAH,  
TINGKAT KETERGANTUNGAN, TINGKAT KEMAKMURAN, DAN  
LEVERAGE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH  
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019-2021**

Oleh:

**LINDA KUSUMANINGTYAS**  
NIM.18.52.21.127

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah  
pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 M / 13 Syawal 1444 H dan dinyatakan  
telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi

Dewan Penguji :

Penguji I (Merangkap Ketua Sidang)  
Marita Kusuma Wardani, S.E., M.Si. Ak.  
NIP. 19740302 200003 2 003



Penguji II  
Ade Setiawan, M.Ak., CRA., CRP., CIAP.  
NIP. 19800712 201403 1 003



Penguji III  
Frank Aligarh, S. Pd., M. Sc.  
NIP. 19920912 201903 1 011



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta



  
Dr. M. Rahmawan Arifin, M.Si.  
NIP. 19720304 200112 1 004

## MOTTO

*“Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari segala urusan), maka tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”*

(QS. Al-Insyiraah 5-8)

*"..... Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung."*

(Q.S. Ali Imran :173)

*“Apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu.”*

(Umar bin Khattab)

*“barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia Kembali”*

(HR. Tirmizi)

*“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa.”*

(Ridwan Kamil)

*“Jangan menilai saya dari kesuksesan, tetapi nilai saya dari seberapa sering saya jatuh dan berhasil bangkit kembali.”*

(Nelson Mandela)

## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillahirabbil 'alamin,*

Setelah melalui proses lika-liku yang panjang pada akhirnya sebuah karya yang sederhana ini dapat terselesaikan atas Kehendak dan Kuasa-Mu. Hadiah kecil ini kupersembahkan untuk:

1. Kepada kedua orangtuaku tercinta Bapak Abdur Rohman dan Ibu Mubayinatul Aini yang telah merawatku, bekerja keras, memberikan do'a, dukungan dan semangat yang luar biasa sehingga saya dapat menyelesaikan karya ku ini.
2. Kepada kakak-kakakku tersayang serta sahabat-sahabatku tercinta yang tidak dapat saya sebut satu persatu, dan saudara-saudaraku semua, tidak ada kata yang bisa menggambarkan rasa terima kasihku kepada kalian atas segala do'a, dukungan dan motivasi yang diberikan kepada saya.
3. Kepada Ibu Dosen Anim Rahmayati, SEI, M.Si. terima kasih atas kesabaran dalam membimbing saya untuk menyelesaikan karya saya ini.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang sekarang ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, BELANJA DAERAH, TINGKAT KETERGANTUNGAN, TINGKAT KEMAKMURAN, DAN *LEVERAGE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019-2021”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan pendidikan jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said.

Penulis menyadari bahwa dalam melakukan penelitian ini telah mendapat banyak dukungan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak yang telah memberikan pemikiran, waktu, tenaga, dan lain sebagainya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala ketulusan hati penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

2. Dr. M. Rahmawan Arifin, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Khairul Imam, S.HI., M.Si., selaku Ketua Jurusan Manajemen dan Akuntansi Syariah.
4. Wahyu Pramesti, SE., M.Si., AK., selaku dosen Pembimbing Akademik.
5. Anim Rahmayati, SEI, M.Si., selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian, motivasi dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Tim Penguji Skripsi yang telah menguji dan memberikan banyak masukan.
8. Kepada orang tua saya, Bapak Abdur Rohman dan Ibu Mubayinatul Aini, terimakasih atas doa, kasih sayang, support, dan pengorbanan yang selalu diberikan tanpa pernah ada habisnya.
9. Kepada kakak-kakak saya Nurrohmah Faizatul Jannah, Indra dan Didin Dwi Budiman yang tidak henti-hentinya memberikan semangat dan motivasi kepada saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Ibu Wahyem dan keluarga terimakasih sudah menerima saya seperti keluarga sendiri selama di solo.

11. Kepada kedua best patner saya Suci dan Devi yang telah memberi banyak motivasi kepada saya selama mengerjakan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabatku yang menjadi penyemangatku tiap saat dan juga kepada teman-teman Akuntansi Syariah kelas C angkatan 2018 yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
13. Teman-teman angkatan 2018 prodi Akuntansi Syariah yang telah memberikan pengalaman selama penulis menempuh studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin. Semoga semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi dan dalam proses sidang sampai penulis memperoleh gelarnya senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangat dibutuhkan. Semoga skripsi ini berguna bagi semua pihak yang berkepentingan.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Sukoharjo, 10 April 2023

Penulis

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of local government size, regional spending, level of dependence, level of prosperity and leverage on local government financial performance. This research is a quantitative research using secondary data obtained from the official website of the local government which is the LKPD of districts / cities in Central Java.*

*The population of this study were all districts / cities in Central Java during 2019-2021. The sampling technique in this study used purposive sampling so as to get a sample of 105 data. This research analysis technique uses multiple regression analysis with Eviews 10.*

*The results showed that the variable size of the government, regional spending had a positive effect on the financial performance of local governments, the variable level of prosperity negatively affected the financial performance of local governments, while the variables of the level of dependence, and leverage did not affect the financial performance of local governments.*

*Keywords: Government Size, Local Spending, Level of Dependence, Wealth, Leverage, Financial Performance.*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran pemerintah daerah, belanja daerah, tingkat ketergantungan, tingkat kemakmuran dan *leverage* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari situs web resmi pemerintah daerah yang merupakan LKPD kabupaten/kota Se Jawa Tengah.

Populasi penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota Se Jawa Tengah selama tahun 2019-2021. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* sehingga mendapatkan sampel sebanyak 105 data. Teknik analisis penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan Eviews 10.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ukuran pemerintah, belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, variabel tingkat kemakmuran berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan variabel tingkat ketergantungan, dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci : Ukuran Pemerintah, Belanja Daerah, Tingkat Ketergantungan, Tingkat Kemakmuran, *Leverage*, Kinerja Keuangan.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....	iii
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN .....	iv
NOTA DINAS .....	v
PENGESAHAN .....	vi
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
<i>ABSTRAK</i> .....	xi
ABSTRAK .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR .....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN .....	20
1.1 Latar Belakang .....	20
1.2 Identifikasi Masalah .....	30
1.3 Batasan Masalah.....	30
1.4 Rumusan Masalah .....	30
1.5 Tujuan Penelitian.....	31
1.6 Manfaat Penelitian.....	31
1.7 Jadwal Penelitian .....	32
1.8 Sistematika Penulisan Skripsi .....	32
BAB II LANDASAN TEORI .....	34
2.1 Kajian Teori.....	34
2.1.1 Teori Keagenan.....	34
2.1.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	36
2.1.3 Ukuran Pemerintah Daerah.....	38
2.1.4 Belanja Daerah.....	38

2.1.5 Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat .....	39
2.1.6 Tingkat Kemakmuran Daerah ( <i>Wealth</i> ).....	39
2.1.7 <i>Leverage</i> .....	41
2.2 Hasil Penelitian yang Relevan.....	41
2.3 Kerangka Pemikiran .....	49
2.4 Hipotesis .....	50
2.4.1 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	50
2.4.2 Pengaruh Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	51
2.4.3 Pengaruh Tingkat Ketergantungan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	52
2.4.4 Pengaruh Tingkat Kemakmuran terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	53
2.4.5 Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah...	54
BAB III METODE PENELITIAN.....	56
3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian .....	56
3.2 Jenis Penelitian .....	56
3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel .....	56
3.3.1 Populasi.....	56
3.3.2 Sampel .....	57
3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel .....	57
3.4 Data dan Sumber Data.....	58
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	58
3.6 Variabel Penelitian .....	59
3.6.1 Variabel Dependen .....	59
3.6.2 Variabel Independen.....	59
3.7 Definisi Operasional Variabel .....	59
3.8 Teknik Analisis Data .....	61
3.8.1 Estimasi Model Regresi Data Panel.....	61
3.8.2 Pemilihan Model Regresi Data Panel .....	63
3.8.3 Uji Asumsi Klasik.....	66
3.8.4 Uji Ketepatan Model.....	71

3.8.5 Analisis Regresi Linier Berganda .....	72
3.8.6 Uji Hipotesis .....	73
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	74
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	74
4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data .....	74
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	74
4.2.2 Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel .....	77
4.2.3 Uji Asumsi Klasik.....	78
4.2.4 Uji Ketetapan Model.....	84
4.2.5 Analisis Regresi Linier Berganda .....	85
4.2.6 Uji Hipotesis .....	87
4.3 Pembahasan Hasil Analisis Data .....	90
4.3.1 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	90
4.3.2 Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	91
4.3.3 Pengaruh Tingkat Ketergantungan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	92
4.3.4 Pengaruh Tingkat Kemakmuran Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	93
4.3.5 Pengaruh <i>Leverage</i> Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .	94
DAFTAR PUSTAKA .....	98
LAMPIRAN.....	102



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 PAD Tahun Anggaran 2019-2021 .....	25
Tabel 3.1 Pemilihan Sampel .....	57
Tabel 3.2 Devinisi Operasional Variabel .....	60
Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	75
Tabel 4.2 Hasil Uji Chow.....	77
Tabel 4.3 Hasil Uji Hausman .....	78
Tabel 4.4 Uji Multikolinearitas .....	80
Tabel 4.5 Uji Heterokedastisitas .....	82
Tabel 4.6 Uji Autokorelasi .....	83
Tabel 4.7 Uji Statistik F .....	84
Tabel 4.8 Uji Koefisien Determinasi .....	85
Tabel 4.9 Hasil Regresi .....	86
Tabel 4.10 Uji Statistik t .....	89

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Tren Capaian Total Pendapatan Daerah 2019-2021 .....	25
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .....	49
Gambar 4.1 Uji Normalitas .....	79

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah.....	102
Lampiran 2 Tabulasi Data Variabel .....	104
Lampiran 3 Uji Statistik Deskriptif.....	109
Lampiran 4 Hasil Uji Pemilihan Model .....	110
Lampiran 5 Pemilihan Model Regresi Data Panel.....	113
Lampiran 6 Asumsi Klasik .....	116
Lampiran 7 Uji Analisis Regresi dan Uji Hipotesis.....	119
Lampiran 8 Jadwal Penelitian .....	120
Lampiran 9 Nilai Hasil Cek Plagiasi.....	122
Lampiran 10 Daftar Riwayat Hidup.....	123

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kinerja Keuangan Daerah merupakan suatu gambaran tentang tingkat pencapaian pelaksanaan pemerintah daerah dalam suatu program atau kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai sasaran, tujuan, misi, sekaligus visi yang telah ditetapkan dalam suatu program dalam periode tertentu (Bastian, 2010).

Kinerja keuangan merupakan indikator yang digunakan dalam menilai kinerja pemerintah daerah. Analisis kinerja keuangan dipergunakan untuk mengidentifikasi bagaimana alur keuangan pemerintah daerah tersebut (Sari & Mustanda, 2019).

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran (Natoen et al., 2019).

Ukuran pemerintah daerah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, semakin besar ukuran pemerintah daerah maka semakin besar pula peluang kemudahan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional dan roda pemerintahan daerah, begitu juga sebaliknya apabila ukuran pemerintah daerah kecil maka dalam pelaksanaan operasional dan roda pemerintahan daerah akan cenderung

mengalami kesulitan, karena semakin besar ukuran pemerintah maka dapat memberi kelancaran dalam memperoleh pendapatan asli daerah (Aziz, 2016).

Ukuran pemerintah yang diproksikan dengan total aset yang dimiliki daerah merupakan salah satu indikator dalam mengukur kemudahan kegiatan operasional daerah, semakin besar ukuran pemerintah daerah maka semakin besar pula kemudahan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional dan roda pemerintahan daerah (Antari dan Sedana, 2018).

Hubungan antara ukuran pemerintah dengan kinerja keuangan pemerintah daerah sangatlah berpengaruh, karena semakin besar ukuran pemerintah daerah maka semakin besar pula peluang kemudahan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional dan roda pemerintahan daerah, begitu juga sebaliknya apabila ukuran pemerintah daerah kecil maka dalam pelaksanaan operasional dan roda pemerintahan daerah akan cenderung mengalami kesulitan, karena semakin besar ukuran pemerintah maka dapat memberi kelancaran dalam memperoleh pendapatan asli daerah (Aziz, 2016).

Belanja Daerah merupakan suatu kewajiban pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta pemenuhan kewajiban daerah tersebut dengan memaksimalkan anggaran yang dimilikinya. Semakin tinggi belanja pemerintah daerah maka akan semakin tinggi juga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Salsabilla & Rahayu, 2021).

Terdapat hubungan yang signifikan antara belanja daerah dengan kinerja pemerintah daerah, dibuktikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 167 Ayat 1 Tentang Pemerintah

Daerah, menyatakan bahwa belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan urusan wajib dan pelayanan lain di bidang pendidikan, kesehatan, penyediaan fasilitas sosial, fasilitas umum, dan pengembangan sistem jaminan sosial (Aziz, 2016).

Menurut Aulia & Rahmawaty (2020) tingkat ketergantungan pemerintah daerah dapat dinyatakan dengan banyaknya dana perimbangan yang diserahkan oleh pusat kepada pemda. Tingkat ketergantungan pada pusat dapat dilihat dari seberapa besar DAU yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan daerah. Sehingga menunjukkan bahwa DAU yang diterima pemerintah daerah tergantung pada pemerintah pusat akan menunjukkan semakin kuatnya ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya (Rusmita, 2019).

Hubungan antara tingkat ketergantungan pada pusat dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Tingkat ketergantungan dinyatakan dengan besarnya Dana Alokasi Umum (DAU). Pemerintah pusat akan memantau pelaksanaan alokasi DAU sehingga dapat mendorong pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan kinerja keuangannya (Primadiva et al., 2021).

Kemakmuran pemerintah daerah dapat diketahui dari total pendapatan asli daerahnya, semakin tinggi pendapatan asli daerah maka semakin makmur pula suatu daerah. Kemakmuran dapat diukur dengan perbandingan antara

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan total pendapatan (Aulia & Rahmawaty, 2020).

Terdapat hubungan antara *wealth* (kemakmuran pemerintah daerah) dengan kinerja keuangan pemerintah daerah, *wealth* mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam memaksimalkan setiap menjadi sumber pembiayaan daerahnya, oleh karena itu PAD digunakan sebagai indikator tingkat kemakmuran daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah yang memiliki nilai PAD tinggi akan semakin mudah dalam memenuhi kebutuhan daerahnya serta akan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta pemenuhan kebutuhan daerahnya. Hal tersebut menandakan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah telah berjalan secara efisien (Salsabilla & Rahayu, 2021).

*Leverage* merupakan besarnya aset daerah yang dibiayai oleh utang dengan alasan daerah tersebut tidak mampu membiayai daerahnya dengan modal sendiri. Secara garis besar, rasio utang atau *Leverage* ini dinilai menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukkan tingkat kesehatan serta kemandirian finansial pemerintah daerah karena berkaitan dengan utang. Proksi *Leverage* pada penelitian ini dihitung menggunakan *Debt to Equity Ratio* (Salsabilla & Rahayu, 2021).

Hubungan antara *leverage* dengan kinerja keuangan pemerintah daerah, *leverage* merupakan perbandingan antara utang dengan modal yang dimiliki, dengan semakin tingginya rasio *Leverage* tinggi cenderung tidak memperhatikan tingkat utang dalam upaya memperbaiki kinerjanya, maka hal

tersebut juga tidak mendorong pemerintah daerah untuk dapat memperbaiki kinerja keuangan pemerintah daerahnya (Salsabilla & Rahayu, 2021).

Fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini menunjukkan bahwa respon masyarakat terhadap pelaksanaan otonomi daerah sangat tinggi sehingga pemerintahan daerah dituntut untuk melakukan pemerintahan yang baik dan masyarakat mendorong pemerintah untuk memiliki kinerja yang lebih efektif dan efisien dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan adanya tuntutan masyarakat akan transportasi dalam pengelolaan keuangan pemerintah (Rusmita, 2019).

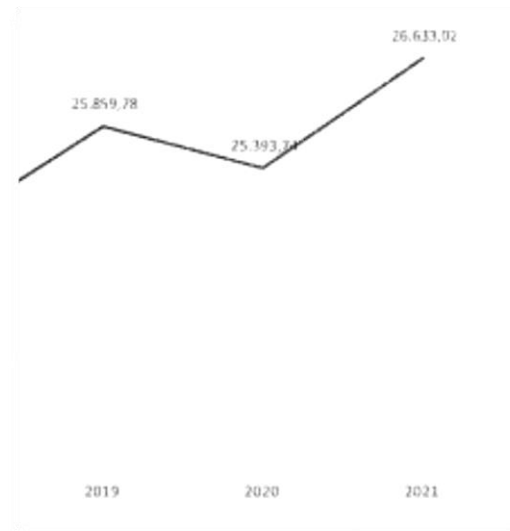
Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2021 masih diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan pemberian stimulus untuk pemulihan perekonomian. Realisasi pendapatan daerah tahun ini meulai kembali *on the track* mengalami kenaikan setelah tahun lalu mengalami tekanan yang disebabkan oleh pandemi covid-19, diantaranya yang mengalami kenaikan pesat adalah realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yaitu realisasi atas pelayanan pada rumah sakit (khususnya klaim pelayanan covid-19) dan realisasi dana transfer pusat serta kembali naiknya anemi masyarakat untuk membayar pajak daerah ([www.ppid.jatengprov.go.id](http://www.ppid.jatengprov.go.id)).

Perkembangan capaian pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah digambarkan pada grafik dibawah ini :



Gambar 1.1

## Grafik Tren Capaian Total Pendapatan Daerah 2019-2021



Sumber: [www.ppid.jatengprov.co.id](http://www.ppid.jatengprov.co.id)

Dapat dilihat dari grafik diatas bahwa pendapatan daerah kabupaten/kota provinsi jawa tengah tahun 2019 relatif tinggi, kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021.

Meningkatnya realisasi PAD tahun 2021 berimbas juga pada membaiknya kemampuan fiskal daerah. Kontribusi setiap sumber pendapatan terhadap total pendapatan daerah sebagai berikut :

Tabel 1.1

## PAD Tahun Anggaran 2019-2021

PAD Tahun 2019	55,83%
PAD Tahun 2020	53,83%
PAD Tahun 2021	55,18%

Pendapatan asli daerah tahun anggaran 2021 memberikan kontribusi sebesar 55,18%, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kontribusi pada tahun anggaran 2020 sebesar 53,83%. Sedangkan pada tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 55,83%, jadi bisa dikatakan bahwa pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 dan meningkat kembali pada tahun 2021 ([www.ppjd.jatengprov.go.id](http://www.ppjd.jatengprov.go.id)).

Kinerja keuangan pemerintah daerah kab/kota provinsi jawa tengah pada tahun 2019-2021 bisa dikatakan cukup efisien karena diketahui dari total realisasi pendapatan tahun 2019-2021 sebesar Rp.237.983.051 lebih besar di bandingkan dengan total realisasi pengeluarannya yaitu sebesar Rp.209.006.052.

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang meneliti tentang kinerja keuangan pemerintah daerah antara lain penelitian Riani & Hrp (2022) menyatakan bahwa PAD, *Leverage*, Ukuran Pemerintahandan Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Salsabilla & Rahayu (2021) menyatakan bahwa *wealth* dan belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Sari & Halmawati (2021) menyatakan bahwa PAD, DAU, &belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Aulia & Rahmawaty (2020) menyatakan bahwa kemakmuran pemerintah

daerah & ukuran pemerintah daerah berpengaruh, sedangkan tingkat ketergantungan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kirana & Sulardi (2020) menyatakan bahwa belanja modal dan ukuran pemerintah berpengaruh positif, sedangkan tingkat kemandirian tidak mempengaruhi, sementara opini audit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Anynda & Hermanto (2020) menyatakan bahwa rasio kemandirian, efektifitas PAD, pengelolaan belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Nugraheni & Adi (2020) menyatakan bahwa *wealth*, *size*, *leverage*, dan pendapatan pajak daerah memiliki hubungan signifikan positif, serta temuan audit BPK memiliki hubungan yang signifikan negatif, sedangkan tingkat ketergantungan pada pusat, belanja modal, dan ukuran legislatif tidak ada hubungan yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Rusmita (2019) yang menunjukkan hasil bahwa belanja daerah dan ketergantungan pemerintah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan ukuran pemerintah, kemakmuran, dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Natoen et al., (2019) menyatakan bahwa jumlah penduduk, *size*, *wealth* berpengaruh signifikan, sedangkan *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Sari & Mustanda (2019) menyatakan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh negatif, sedangkan PAD dan belanja modal berpengaruh positif

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Saraswati & Rioni (2019) menyatakan bahwa PAD berpengaruh, sedangkan ukuran pemerintah daerah & *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Nugroho & Prasetyo (2018) menyatakan bahwa *Intergovernmental revenue* berpengaruh, sedangkan ukuran pemerintah daerah, belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Antari & Sedana (2018) menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif, sedangkan belanja modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Mulyani & Wibowo (2017) menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif, sedangkan ukuran pemerintah, *intergovernmental revenue*, dan PAD berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Armaja et al., (2017) kekayaan daerah & dana perimbangan berpengaruh negatif, sedangkan belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Aziz (2016) menyatakan bahwa ukuran pemerintah dan belanja daerah berpengaruh, sedangkan *intergovernmental revenue* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sari (2016) menyatakan bahwa ukuran pemerintah, PAD, & dana perimbangan berpengaruh sedangkan *leverage* & ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Marhawai (2015) menyatakan bahwa kemakmuran pemerintah & *intergovernmental revenue* berpengaruh positif, sedangkan ukuran legislatif & ukuran pemerintah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Rusmita (2019) yang berjudul *Effect of Regional Government Characteristics of Financial Performance*. Selain itu, penelitian ini dilakukan karena adanya perbedaan pada peneliti terdahulu pada penelitian Rusmita (2019) yang menyatakan bahwa belanja daerah dan ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan menurut Aulia & Rahmawaty (2020) dan Natoen et al., (2019) tingkat ketergantungan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian Nugroho & Prasetyo (2018) menyatakan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pada penelitian Rusmita (2019) menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah, tingkat kemakmuran, dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan dalam penelitian Salsabilla & Rahayu (2021) *wealth* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam penelitian Aulia & Rahmawaty (2020), Aziz (2016) dan Sari (2016) menyatakan ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan dalam penelitian Riani & Hrp (2022) dan Nugraheni & Adi (2020) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, BELANJA DAERAH, TINGKAT KETERGANTUNGAN, TINGKAT KEMAKMURAN, DAN LEVERAGE**

## **TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019-2021”.**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi jawa tengah pada tahun 2019-2021 bisa dikatakan cukup efisien walaupun pendapatannya masih belum stabil.
2. Adanya ketidak konsistenan hasil-hasil penelitian terdahulu.

### **1.3 Batasan Masalah**

1. Penelitian ini berfokus pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah tahun anggaran 2019-2021.
2. Penelitian ini hanya menggunakan variabel ukuran pemerintah daerah, belanja daerah, tingkat ketergantungan pemerintah, kemakmuran pemerintah, dan *leverage* sebagai karakteristik pemerintah daerah yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

### **1.4 Rumusan Masalah**

1. Apakah Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah?
2. Apakah Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah?
3. Apakah Tingkat Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah?

4. Apakah Kemakmuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah?
5. Apakah *Leverage* berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk menganalisis pengaruh belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk menganalisis pengaruh tingkat ketegantungan pada pemerintah pusat terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
4. Untuk menganalisis pengaruh kemakmuran pemerintah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
5. Untuk menganalisis pengaruh leverage terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya adalah:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah serta dapat dijadikan referensi bagi peneliti yang akan meneliti lebih lanjut berkaitan dengan masalah ini.

## 2. Bagi Pemerintah Daerah

Pemelitian ini akan memberikan manfaat bagi pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pihak pemerintah daerah mengenai ukuran pemerintah daerah, belanja daerah, tingkat ketergantungan pada pusat, kemakmuran daerah (*wealth*), dan *leverage* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga dapat mengoptimalkan kinerja pemerintah daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik demi kemajuan daerah.

### 1.7 Jadwal Penelitian

Terlampir

### 1.8 Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, menentukan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga sistematika penulisan.

#### BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan mengenai kajian teori yang membahas tentang teori yang digunakan dan definisi variabel yang digunakan, menguraikan hasil penelitian yang relevan, kerangka berfikir, dan hipotesis.

#### BAB III METODE PENELITIAN



Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan penentuan populasi, sampel, dan sumber data. Selain itu, menjelaskan pula tentang teknik pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional, serta pembahasan mengenai teknik analisis data.

#### **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum penelitian, pengujian, dan hasil analisis data, dan pembahasan hasil analisis data.

#### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang diberikan penulis.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Kajian Teori**

##### **2.1.1 Teori Keagenan**

Menurut Jensen & Meckling (1976) teori keagenan adalah suatu kontrak antara principal dengan agent, dengan melihat pendelegasian wewenang dalam mengambil keputusan kepada agent. Principal yaitu pihak yang bertugas untuk membuat suatu kontrak, mengawasi, termasuk pendelegasian otoritas atas kebijakan kepada agent. Agent sendiri adalah bertugas untuk menerima otoritas dan menjalankan kontrak dari principal.

Teori keagenan adalah gambaran suatu hubungan antara kedua belah pihak di mana salah satunya berperan sebagai pemberi wewenang sedangkan pihak lainnya berperan sebagai penerima yang bertugas untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kepentingan yang telah dilimpahkan (Sari & Halmawati, 2021).

Teori keagenan memandang bahwa adanya penyimpangan dari pemerintah daerah yang mengutamakan *conflict of interest* yaitu bertindak dengan penuh kesadaran untuk kepentingan mereka sendiri serta pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat (Primadiva et al., 2021).

Terjadinya *conflict of interest* yang dilakukan oleh agent (pemerintah pusat) disebabkan karena adanya *information asymmetry* yaitu kondisi dimana agent (pemerintah daerah) memiliki akses informasi yang

lebih unggul dibandingkan dengan prinsipal (masyarakat) inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh agen (pemerintah pusat) (Primadiva et al., 2021).

Dalam organisasi sektor publik teori keagenan juga dapat diterapkan pada pemerintah daerah. Dimana yang berperan prinsipal adalah pihak legislatif yaitu rakyat yang di wakili oleh DPRD dan agen adalah pihak eksekutif yaitu pemerintah daerah (Putri & Amanah, 2020).

Teori keagenan menunjukkan bahwa setiap individu hanya termotivasi oleh kepentingan diri sendiri sehingga menimbulkan masalah kepentingan antara principal dan agent. Setiap pemerintah daerah bertindak sebagai agent untuk melaksanakan kontrak dari Principal. Principal selaku legislatif wajib untuk mengawasi dan menilai kinerja pemerintah daerah (*agent*), sehingga dapat dilihat sejauh apa kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya dan bertindak dalam mengelola sumber daya supaya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Anynda & Hermanto, 2020).

Dalam hubungan keagenan, terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan atau kontrak, yakni pihak yang memberikan wewenang atau kekuasaan (*prinsipal*) dan yang menerima kewenangan (*agen*). Dalam suatu organisasi hubungan ini berbentuk vertikal, yakni antara pihak atasan (sebagai *prinsipal*) dan pihak bawahan (sebagai *agen*) (Mulyani & Wibowo, 2017).

Teori tentang hubungan kedua pihak tersebut populer dikenal sebagai teori keagenan. Hubungan keagenan lebih sering dibahas dalam konteks manajemen perusahaan yang berorientasi bisnis. Teori yang menjelaskan hubungan prinsipal dan agen ini salah satunya berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi dan teori organisasi (Mulyani & Wibowo, 2017).

### **2.1.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengungkapkan bahwa kinerja adalah keluaran/ hasil dari kegiatan/ program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Kinerja berasal dari pengertian performance. Pengertian performance sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung (Natoen et al., 2019).

Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, sebagai berikut: “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.” (Natoen et al., 2019).

Kinerja Keuangan Pemerintah daerah dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan di bidang penyelenggaraan pemerintah yang dapat di nilai dengan uang. Setiap organisasi berkeinginan mencapai tingkat kinerja tinggi. Untuk itu perlu mengetahui perkembangan pencapaian standar, target, dan waktu yang tersedia (Natoen et al., 2019).

Pengukuran perlu dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana, apakah terdapat kesenjangan kinerja, dan apakah hasil akhir diperkirakan dapat dicapai. Apabila tidak dapat mengukur, maka tidak dapat mengelola pelaksanaan kinerja yang dapat menjamin pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan (Natoen et al., 2019).

Menurut Anynda & Hermanto (2020) Kinerja keuangan daerah merupakan komponen paling penting untuk mengukur suatu kinerja serta konsep dalam pengelolaan organisasi pemerintah dengan menjamin dalam menjalankan pertanggungjawaban kepada masyarakat oleh lembaga pemerintah. Dalam penelitian ini, kinerja keuangan daerah adalah gambaran pencapaian dalam suatu program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam hal itu, jika program yang dilaksanakan pemerintah daerah dengan tepat dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan tercapainya suatu kinerja keuangan pemerintah daerah yang

berkualitas merupakan keberhasilan yang dapat mensejahterakan masyarakat (Anynda & Hermanto, 2020).

### **2.1.3 Ukuran Pemerintah Daerah**

Menurut Sumarjo (2010) dalam penelitian Nugroho & Prasetyo (2018) ukuran pemerintah daerah menggunakan total aset pemerintah daerah karena aset menunjukkan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan dapat diperoleh. Semakin besar total aset, penjualan dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan (Saraswati & Rioni, 2019).

Menurut Natoen et al., (2019) ukuran (size) pemerintah daerah adalah sesuatu yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menentukan besar atau kecilnya pemerintah daerah, semakin besar pemerintah daerah maka semakin baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ukuran pemerintah daerah digunakan untuk mengetahui besar kecilnya obyek dari pemerintah daerah tersebut yang dapat dilihat dari total aset pemerintah daerah (Nugraheni & Adi, 2020).

### **2.1.4 Belanja Daerah**

Berdasarkan (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait

dengan pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal (Sari & Halmawati, 2021). Belanja daerah dapat dipahami sebagai kewajiban pemerintah daerah yang mengurangi kekayaan bersih yang terjadi akibat transaksi masa lalu (Armaja et al., 2017).

### **2.1.5 Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat**

Menurut Aulia & Rahmawaty (2020) tingkat ketergantungan pemerintah daerah dapat dinyatakan dengan banyaknya dana perimbangan yang diserahkan oleh pusat kepada pemda. Tingkat ketergantungan pada pusat dapat dilihat dari seberapa besar DAU yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Intergovernmental revenue merupakan bagian dari pendapatan daerah yang berasal dari lingkungan eksternal (luar kotamadya) dan besarnya ketergantungan pemerintah daerah dari transfer pemerintah pusat (Aziz, 2016).

Menurut Sedyaningsih (2015), dalam penelitian Nugraheni & Adi (2020) DAU merupakan dana transfer dari pemerintah pusat untuk membantu pemerintah daerah dalam pembiayaan pengeluarannya. Melalui dana yang telah diberikan, pemerintah pusat akan memantau pelaksanaan penggunaan DAU sehingga dapat memacu pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja keuangannya.

### **2.1.6 Tingkat Kemakmuran Daerah (*Wealth*)**

Menurut Salsabilla & Rahayu (2021) Kemakmuran daerah (*Wealth*) mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam memaksimalkan setiap

potensi menjadi sumber pembiayaan daerahnya, oleh karena itu PAD digunakan sebagai indikator tingkat kemakmuran daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah yang memiliki nilai PAD tinggi akan semakin mudah dalam memenuhi kebutuhan daerahnya serta akan meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik, dengan meningkatnya pelayanan publik serta pemenuhan kebutuhan daerahnya hal tersebut menandakan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah telah berjalan secara efisien.

Menurut (Anynda & Hermanto, 2020) Rasio Kemandirian Daerah merupakan gambaran dari tergantungnya daerah terhadap tingkat partisipasi oleh masyarakat dalam bidang pembangunan daerah. Rasio kemandirian juga menunjukkan bagaimana peran masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi juga peran masyarakat dalam membayar retribusi dan pajak daerah yang merupakan komposisi paling penting pendapatan asli daerah.

Tingkat kemakmuran daerah memperlihatkan pendapatan yang didapat dari daerah itu sendiri dan diperlihatkan dari PAD daerah tersebut. Peningkatan PAD akan memperlihatkan peningkatan dari pertumbuhan ekonomi dan akan berperan dalam kemandirian pemerintah daerah yang diperlihatkan dengan kinerja pemerintah daerah (Nugraheni & Adi, 2020).

Tingkat kemakmuran sama dengan kemandirian yang tinggi ditunjukkan dari semakin tingginya penerimaan PAD daerah tersebut. Artinya, pemerintah daerah sukses dalam merencanakan dan melaksanakan



strategi kegiatan/program, yang dapat dilihat dari peningkatan penerimaan PAD (Kirana & Sulardi, 2020).

### **2.1.7 Leverage**

Menurut Weill (2003) dalam Saraswati & Rioni (2019) mengungkapkan bahwa *leverage* merupakan proporsi yang menggambarkan besarnya utang pemerintah dari pihak eksternal dibandingkan dengan modal sendiri. *Leverage* merupakan besarnya aset daerah yang dibiayai oleh utang dengan alasan daerah tersebut tidak mampu membiayai daerahnya dengan modal sendiri (Salsabilla & Rahayu, 2021).

## **2.2 Hasil Penelitian yang Relevan**

Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu

<b>No.</b>	<b>Nama Peneliti/ Tahun</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil penelitian</b>
1.	Dessy Riani & Junita Putri Rajan Hrp, (2022)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Leverage, Ukuran Pemerintahan, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Provinsi Sumatera Utara.	Metode penelitian: kuantitatif.  Sampel: 33 sampel dengan populasi 33 terdiri dari 25 kabupaten dan 8 kota.  Teknik analisis data:  Analisis regresi linier berganda.	PAD, <i>Leverage</i> , Ukuran Pemerintahandan Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.	Sheila Salsabila & Sri Rahayu, (2021)	Pengaruh <i>Wealth</i> , <i>Leverage</i> dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah ( Studi Kasus Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia Tahun 2019 )	Metode penelitian: kuantitatif.  Sampel: 34 provinsi di Indonesia.  Teknik analisis data: analisis regresi linier berganda.	<i>Wealth</i> berpengaruh positif dan belanja daerah berpengaruh negatif, sedangkan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
3.	Berti Indah Sari & Halmawati, (2021)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat	Metode penelitian: kuantitatif.  Sampel: 12 kabupaten dan 7 kota di sumatra barat.  Teknik analisis data: analisis regresi linier berganda.	PAD, DAU, & belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
4.	Rafika Aulia & Rahmawaty, (2020)	Pengaruh Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah	Metode penelitian: kuantitatif.  Sampel: 23 kab/kota di aceh.  Teknik analisis data: analisis	Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif, Kemakmuran pemerintah daerah negatif, sedangkan tingkat ketergantungan tidak berpengaruh terhadap kinerja

		Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh	regresi linier berganda.	keuangan pemerintah daerah.
5.	Akhila Santika Kirana dan Sulardi, (2020)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun 2018)	Metode penelitian: kuantitatif.  Sampel: 461 pemerintah kabupaten/kota  Teknik analisis data: analisis regresi berganda.	Belanja modal dan ukuran pemerintah berpengaruh positif, sedangkan tingkat kemandirian tidak mempengaruhi, sementara opini audit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
6.	Nur Safira Anynda & Suwardi Bambang Hermanto, (2020)	Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, dan Pengelolaan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah	Metode penelitian: kuantitatif.  Sampel: 29 kabupaten dan 9 kota di provinsi jawa timur.  Teknik analisis data: analisis regresi linier berganda.	Rasio kemandirian, efektifitas PAD, pengelolaan belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

7.	Sari Rusmita, (2019)	Effect of Regional Government Characteristics of Financial Performance	<p>Metode penelitian: kuantitatif.</p> <p>Sampel: 12 kabupaten dan 2 kota di provinsi Kalimantan barat.</p> <p>Teknik analisis data: analisis regresi linier berganda.</p>	<p>Belanja daerah berpengaruh negatif, ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Ukuran pemerintah, tingkat kemakmuran dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p>
8.	Ardian Natoen, Ayu Febriyanti, Srikandarwati, & Susi Ardiani, (2019).	Pengaruh Karakteristik Pemerintahan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan Tahun 2013-2017)	<p>Metode penelitian: kuantitatif.</p> <p>Sampel: 15 laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera selatan.</p> <p>Teknik analisis data: analisis regresi linier berganda.</p>	<p>Jumlah penduduk berpengaruh negatif, size, wealth berpengaruh positif signifikan, sedangkan <i>intergovernmental revenue</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p>
9.	Ni Made Diah Permata Sari dan I Ketut Mustanda, (2019)	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap	<p>Metode penelitian: kuantitatif.</p> <p>Sampel: pemerintah daerah</p>	<p>Ukuran pemerintah berpengaruh negatif, sedangkan PAD dan belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p>

		Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	kabupaten bandung. Teknik analisis data: analisis regresi linier berganda.	
10	Dwi Saraswati,S.Pd, M.Si & Yunita Sari Rioni, SE,M.Si,Ak,CA , (2019)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Metode penelitian: kuantitatif. Sampel: 91 data. Teknik analisis data: analisis regresi linier berganda.	PAD berpengaruh, sedangkan ukuran pemerintah daerah & <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
11	Tatas Ridho Nugroho & Novi Eko Prasetyo, (2018)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Jawa Timur	Metode penelitian: kuantitatif. Sampel: 30 Kabupaten/kota. Teknik analisis data: analisis regresi linier berganda.	<i>Intergovernmental revenue</i> berpengaruh, sedangkan ukuran pemerintah daerah, belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
12	Ni Putu Gina Sukma Antari dan Ida Bagus Panji Sedana, (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Metode penelitian: kuantitatif. Sampel: 8 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bali. Teknik analisis data: analisis	PAD berpengaruh positif, sedangkan belanja modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

			regresi linier berganda.	
13	Eviniar Nugraheni & Priyo Hari Adi, (2018)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Meta-Analysis	Metode penelitian: kuantitatif. Sampel: 33 artikel penelitian. Teknik analisis data: meta-analisis.	<i>Wealth, size, leverage</i> , dan pendapatan pajak daerah memiliki hubungan signifikan positif, serta temuan audit BPK memiliki hubungan yang signifikan negatif, sedangkan tingkat ketergantungan pada pusat, belanja modal, dan ukuran legislatif tidak ada hubungan yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
14	Sri Mulyani & Hardiyanto Wibowo, (2017)	Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental revenue dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2012-2015)	Metode penelitian: kuantitatif. Sampel: laporan realisasi anggaran pemerintah daerah dari kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah yang tersedia tahun 2012-2015 sebanyak 105 sampel amatan. Teknik analisis data: analisis	Belanja modal berpengaruh positif, sedangkan ukuran pemerintah, <i>intergovernmental revenue</i> , dan PAD berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

			regresi linier berganda.	
15	Asmaul Aziz, (2016)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah ( Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Di Jawa Timur )	Metode penelitian: kuantitatif.  Sampel: 30 kabupaten/kota di Jawa Timur.  Teknik analisis data: analisis regresi linier berganda.	Ukuran pemerintah, belanja daerah, dan <i>intergovernmental revenue</i> berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
16	Indah puspa sari, (2016)	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pad, Leverage, Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kab/Kota Pulau Sumatra)	Metode penelitian: kuantitatif.  Sampel: 57 kab/kota.  Teknik analisis data: analisis regresi linier berganda.	Ukuran pemerintah, PAD, & dana perimbangan berpengaruh positif sedangkan <i>leverage</i> & ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
17	Marhawai, (2015)	Pengaruh Ukuran Legislatif, Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran	Metode penelitian: kuantitatif.  Sampel: 23 kabupaten/kota Aceh.	Kemakmuran pemerintah & <i>intergovernmental revenue</i> berpengaruh positif, sedangkan ukuran legislatif & ukuran

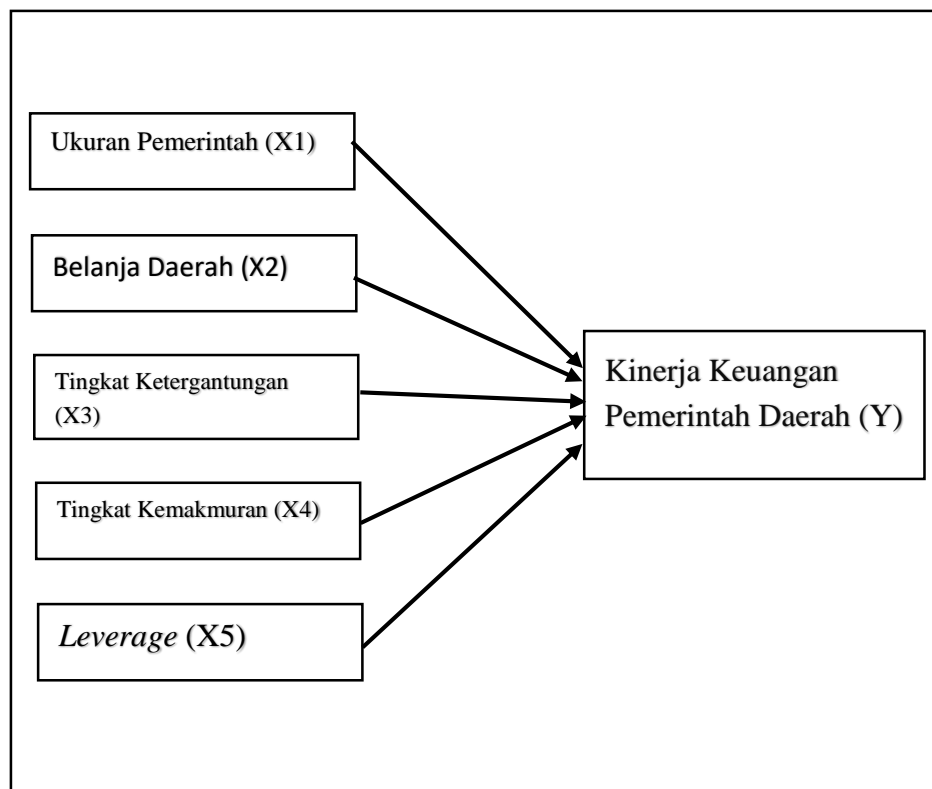
		Pemerintah Daerah dan Intergovernmental Revenue terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Aceh Tahun 2010 s.d 2014)	Teknik analisis data: analisis regresi linier berganda.	pemerintah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
18	Armaja, Ridwan Ibrahim, & Aliamin, (2015)	Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Aceh)	Metode penelitian: kuantitatif. Sampel: 23 kabupaten/kota Teknik analisis data: analisis regresi linier berganda.	Kekayaan daerah & dana perimbangan berpengaruh negatif, sedangkan belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.



### 2.3 Kerangka Berfikir

Berdasarkan latar belakang, teori, dan kajian-kajian terdahulu yang telah diulas di atas, maka terbentuklah sebuah kerangka berfikir pada penelitian ini. Dalam kerangka penelitian dijelaskan atau digambarkan bagaimana hubungan variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen pada penelitian ini meliputi, ukuran pemerintah, belanja daerah, tingkat ketergantungan, tingkat kemandirian, dan *leverage*. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu, kinerja keuangan pemerintah daerah.

Gambar 2.1  
Kerangka Berfikir



## 2.4 Hipotesis

### 2.4.1 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Teori *Agency* menjadi landasan dalam penelitian ini untuk menjelaskan variabel ukuran pemerintah daerah. Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai agen bagi rakyat prinsipal akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak sebaik-baiknya bagi kepentingan rakyat (Putri & Amanah, 2020).

Menurut Natoen et al., (2019) ukuran (size) pemerintah daerah adalah sesuatu yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menentukan besar atau kecilnya pemerintah daerah, semakin besar pemerintah daerah maka semakin baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ukuran pemerintah daerah digunakan untuk mengetahui besar kecilnya obyek dari pemerintah daerah tersebut yang dapat dilihat dari total aset pemerintah daerah (Nugraheni & Adi, 2020).

Ukuran pemerintah diproksikan dengan total aset yang dimiliki daerah merupakan salah satu indikator dalam mengukur kemudahan kegiatan operasional daerah, semakin besar ukuran pemerintah daerah maka semakin besar pula kemudahan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional dan roda pemerintahan daerah (Antari & Sedana, 2018).

Ukuran pemerintah daerah yang besar memberikan kelancaran dalam memperoleh pendapatan asli daerah sehingga dapat meningkatkan

realisasi pendapatan asli daerah dan nantinya akan berdampak pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah (Sari & Mustanda, 2019).

Hal ini didukung dengan penelitian Kirana & Sulardi (2020) dan (Nugraheni & Adi, 2020) yang mengemukakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1 : Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

#### **2.4.2 Pengaruh Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Terdapat hubungan antara teori *agency* dengan belanja daerah. Legislatif (*principal*) mengawasi kinerja keuangan agar segala bentuk kebijakan khususnya dalam hal penggunaan alokasi dana dan realisasi keuangan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk dapat mengutamakan kepentingan publik. Pengalokasian dana belanja daerah yang lebih banyak nantinya dapat membantu daerah untuk memperoleh sumber keuangan sehingga berimplikasi pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah (Anynda & Hermanto, 2020).

Belanja daerah dapat dipahami sebagai kewajiban pemerintah daerah yang mengurangi kekayaan bersih yang terjadi akibat transaksi masa lalu (Armaja et al., 2017). Belanja daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait dengan

pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal (Sari & Halmawati, 2021).

Hal ini didukung penelitian Sari & Halmawati (2021), Armaja et al., (2017) dan Anynda & Hermanto (2020) yang menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2 : Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

#### **2.4.3 Pengaruh Tingkat Ketergantungan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Hubungan keagenan juga menjelaskan terkait variabel tingkat ketergantungan pemerintah daerah. Teori keagenan membahas tentang adanya saling keterkaitan antara *agent* dan *principal*. Dengan saling bekerjasama untuk mensejahterakan masyarakat maka pemerintah pusat memberikan wewenang dalam mengelola anggaran kepada pemerintah daerah dan pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola alokasi anggaran dengan baik (Anynda & Hermanto, 2020).

Menurut Aulia & Rahmawaty (2020) tingkat ketergantungan pemerintah daerah dapat dinyatakan dengan banyaknya dana perimbangan yang diserahkan oleh pusat kepada pemda. Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dapat dilihat dari penerimaan dana alokasi umum (Primadiva et al., 2021).

Pemerintah pusat akan memantau pelaksanaan alokasi DAU sehingga dapat mendorong pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan kinerja keuangannya. Menurut Sedyaningsih (2015), dalam penelitian Nugraheni & Adi (2020) DAU merupakan dana transfer dari pemerintah pusat untuk membantu pemerintah daerah dalam pembiayaan pengeluarannya. Melalui dana yang telah diberikan, pemerintah pusat akan memantau pelaksanaan penggunaan DAU sehingga dapat memacu pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja keuangannya.

Untuk menguji hubungan tingkat ketergantungan pada pusat dengan kinerja keuangan pemerintah daerah, maka peneliti menduga bahwa semakin tinggi tingkat ketergantungan pada pusat maka akan semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah. Sehingga peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Tingkat Ketergantungan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

#### **2.4.4 Pengaruh Tingkat Kemakmuran terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Teory *agency* juga menjelaskan terkait variabel tingkat kemakmuran daerah. Teori keagenan membahas tentang adanya saling keterkaitan antara *agent* dan *principal*. Dengan saling bekerjasama untuk mensejahterakan masyarakat maka pemerintah pusat memberikan wewenang dalam mengelola anggaran kepada pemerintah daerah dan pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola alokasi anggaran dengan

baik. Dengan adanya kemandirian daerah yang tinggi dan pemerintah daerah dapat mengelola belanja daerah dengan benar maka diharapkan kinerja keuangan daerah dapat optimal (Anynda & Hermanto, 2020)

Peningkatan PAD akan memperlihatkan peningkatan dari pertumbuhan ekonomi dan akan berperan dalam kemandirian pemerintah daerah yang diperlihatkan dengan kinerja pemerintah daerah (Nugraheni & Adi, 2020). Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh (Nugraheni & Adi, 2020), Anynda & Hermanto (2020) dan Marhawai (2015) yang menemukan bahwa tingkat kemakmuran berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Maka, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Tingkat Kemakmuran berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

#### **2.4.5 Pengaruh *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Dalam teori keagenan, disebutkan bahwa konflik agensi antara *principal* dan *agent* dapat ditekan dengan pengeluaran biaya keagenan berupa *bonding expenditure* yang berupa pinjaman dari pihak ketiga. Namun, keputusan terhadap pendanaan utang memiliki risiko tersendiri. Kehadiran pihak ketiga berpotensi menimbulkan konflik keagenan baru (Kirana & Wahyudi, 2016).

Menurut Weill (2003) dalam Saraswati & Rioni (2019) mengungkapkan bahwa leverage merupakan proporsi yang menggambarkan

besarnya utang pemerintah dari pihak eksternal dibandingkan dengan modal sendiri. *Leverage* merupakan besarnya aset daerah yang dibiayai oleh utang dengan alasan daerah tersebut tidak mampu membiayai daerahnya dengan modal sendiri (Salsabilla & Rahayu, 2021).

Dengan demikian peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5 : *Leverage* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian**

Penelitian ini dimulai dari waktu penyusunan proposal penelitian pada bulan April sampai dengan selesai. Objek penelitian yang di ambil untuk penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah periode tahun 2019-2021. Penelitian ini dilakukan di *website* pemerintah daerah.

### **3.2 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017) penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dimana teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara acak, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

### **3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel**

#### **3.3.1 Populasi**

Populasi yaitu wilayah abstraksi yang mencakup subyek maupun obyek yang berkualitas dan memiliki kriteria atau karakteristik tertentu yang dipilih oleh peneliti sebagai bahan untuk dipelajari sehingga dapat menarik kesimpulan (Sugiyono, 2018).

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah tingkat kabupaten dan kota yang terdapat di Jawa



Tengah. Total populasi sejumlah 35, yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota. Tahun yang digunakan dalam pengambilan data yaitu tahun anggaran 2019-2021.

### 3.3.2 Sampel

Sampel (*sample*) adalah bagian dan karakteristik yang ada pada populasi (Sugiyono, 2018). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo yang memenuhi kriteria sampel.

Tabel 3.1  
Pemilihan Sampel

Jumlah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	35
Jumlah Tahun	3
Total Sampel	105

Data yang diperlukan dalam penelitian yaitu data LKPD sesuai tahun yang diteliti yaitu tahun 2019-2021.

### 3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel merupakan suatu rangkaian pengambilan sampel dengan memilih beberapa unsur yang akan digunakan dalam penelitian (Sugiyono, 2017). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang di sengaja berdasarkan standar tertentu

yang di tentukan oleh peneliti (Sugiyono, 2017). Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah daerah yang memiliki situs web yang masih aktif dan terdapat informasi yang lengkap.
2. Pemerintah daerah yang menyediakan seluruh data-data statistik yang lengkap sesuai dengan variabel penelitian.

### **3.4 Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sugiyono (2017) data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari situs website resmi pemerintah daerah, website DJPK (<https://www.djpk.kemenkeu.go.id>), website Provinsi Jateng (<https://jatengprov.go.id/>), website BPK (<https://www.bpk.go.id>).

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah salah satu cara guna mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam tempat, berbagai sumber, dan berbagai cara (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi. Dokumen adalah catatan dari berbagai kegiatan atau peristiwa masa lalu berupa tulisan, gambar, buku, benda atau karya-karya monumental (Wekke et al., 2019). Dokumen yang digunakan berupa buku, laporan keuangan, jurnal, artikel, dan skripsi mahasiswa (Wekke et al., 2019).

### **3.6 Variabel Penelitian**

#### **3.6.1 Variabel Dependen**

Variabel Dependen atau bisa disebut sebagai variabel terikat merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2017). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah.

#### **3.6.2 Variabel Independen**

Variabel Independen atau bisa disebut sebagai variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadikan sebab timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2017). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Daerah, Tingkat Ketergantungan, Tingkat Kemakmuran, dan *Leverage*.

### **3.7 Definisi Operasional Variabel**

Menurut Sugiyono (2010) operasional variabel adalah suatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen, kemudian ukuran pemerintah, belanja daerah, tingkat ketergantungan, tingkat kemakmuran, dan *leverage* sebagai variabel independen. Definisi operasional variabel secara ringkas di jelaskan pada tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2  
Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Devinisi	Indikator
1.	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Aziz (2016) dalam (Rusmita, 2019) Pengukuran kinerja pemerintah daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu).	<p><i>Rasio efisiensi</i></p> $= \frac{T \text{ Realisasi pengeluaran}}{T \text{ Realisasi Pendapatan}}$ <p>(Rusmita, 2019)</p>
2.	Ukuran Pemerintah	Nugroho & Prasetyo (2018) dalam (Rusmita, 2019) ukuran pemerintah daerah menggunakan total aset pemerintah daerah karena aset menunjukkan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan dapat diperoleh.	Ukuran daerah = Total Aset. (Rusmita, 2019)
3.	Belanja Daerah	Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih” (Aziz, 2016) dalam (Rusmita, 2019).	= <i>Belanja Daerah</i> (Rusmita, 2019).

4.	Tingkat Ketergantungan	Menurut Sumarjo (2010) dalam Rusmita (2019) <i>Intergovernmental Revenue</i> adalah pendapatan yang diterima pemerintah daerah yang berasal dari sumber eksternal dan tidak memerlukan adanya pembayaran kembali.	$= \frac{T \text{ Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan}}$ (Rusmita, 2019).
5.	Tingkat Kemakmuran	Menurut Sumarjo (2010) dalam Rusmita (2019) kemakmuran ( <i>wealth</i> ) pemerintah daerah dapat dinyatakan dengan jumlah PAD.	= PAD (Rusmita, 2019).
6.	<i>Leverage</i>	Menurut Sumarjo (2010) dalam penelitian Rusmita (2019) <i>Leverage</i> merupakan proporsi yang menggambarkan besarnya utang dari pihak eksternal dibandingkan dengan modal sendiri.	$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$ (Rusmita, 2019).

### 3.8 .Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ini dilakukan dengan menggunakan bantuan E-Views 10. Penelitian ini di uji dengan menggunakan analisis statistik deskriptif dan uji hipotesis dengan analisis regresi linier berganda.

#### 3.8.1 Estimasi Model Regresi Data Panel

Berdasarkan Cakra (2017) terdapat beberapa teknik mengestimasi model data panel. Terdiri dari common effect model dengan pendekatan OLS, fixed effect model dengan pendekatan LSDV, dan random effect model dengan pendekatan GLS.

### 3.8.1.1 *Common Effect Model (CEM)*

*Common Effect Model (CEM)* adalah model data panel yang paling sederhana karena menggabungkan data *time series* dan *cross section* (Basuki, 2021). Pada model ini tidak terdapat efek spesifik individual sehingga diasumsikan bahwa perilaku individu dalam berbagai kurun waktu sama. Mengestimasi model common effect bisa menggunakan pendekatan Ordinary Least Square (OLS) atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel (Basuki, 2021).

### 3.8.1.2 *Fixed Effect Model (FEM)*

Pendekatan dengan mengasumsikan bahwa intersep dan koefisien regresi dianggap konstan untuk seluruh unit wilayah/daerah maupun unit waktu (Cakra, 2017). Salah satu cara untuk memperhatikan unit *cross section* atau unit *time series* adalah dengan memasukkan variabel dummy untuk memberikan perbedaan nilai parameter yang berbeda-beda, baik lintas unit *cross section* maupun unit *time series* (Cakra, 2017). Oleh karena itu pendekatan dengan memasukkan variabel dummy ini dikenal juga dengan *Least Square Dummy Variable (LSDV)* (Cakra, 2017).

### 3.8.1.3 *Random Effect Model (REM)*

*Random Effect Model (REM)* akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu (Basuki, 2021). Pada model random effect perbedaan intersep diakomodasi oleh error terms masing-masing perusahaan. Kelebihan menggunakan model random effect yakni bisa menghilangkan

heteroskedastisitas (Basuki, 2021). Model random effect ini dapat diestimasi dengan metode GLS (*Generalized Least Square*) (Cakra, 2017). Model ini juga disebut dengan *Error Component Model* (ECM) atau teknik GLS (Basuki, 2021).

### 3.8.2 Pemilihan Model Regresi Data Panel

Dari 3 metode estimasi model yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk menentukan mana yang digunakan maka perlu pemilihan model secara statistik. Ada tiga pengujian dalam memilih model untuk mengolah data panel antara lain (Cakra, 2017):

#### 3.8.2.1 Uji Chow (*Chow Test*)

Chow test digunakan untuk memilih kedua model antara model common effect dan model fixed effect (Cakra, 2017). Dalam pengujian ini dirumuskan hipotesis berikut (Cakra, 2017):

$H_0$  : (*Common Effect Model*)

$H_1$  : (*Fixed Effect Model*)

Dasar penolakan terhadap  $H_0$  adalah dengan menggunakan F-statistik seperti berikut (Cakra, 2017):

$$\text{Chow} = \frac{RSS1 - RSS2 / (N-1)}{RSS2 / (NT - N - K)}$$

Keterangan:

RSS1 = residual sum of square hasil pendugaan model common effect

RSS2 = residual sum of square hasil pendugaan model fixed effect

N = jumlah data cross section

T = jumlah data time series

K = jumlah variabel bebas

Statistik uji Chow mengikuti sebaran F-statistik. Jika nilai probabilitas F-statistik  $< \alpha$  (0,05), maka  $H_0$  ditolak dan model yang paling baik digunakan yaitu fixed effect model kemudian pengujian akan berlanjut ke uji hausman (Basuki, 2021).

### 3.8.2.2 Uji Husman (*Husman Test*)

Uji hausman diformulasikan untuk membantu dalam membuat.pilihan antara model Fixed Effect dengan Random effect (Wooldridge, 2010). Uji hausman dilakukan berdasarkan perbedaan pada kedua model tersebut (Wooldridge, 2010). Dalam pengujian ini dirumuskan hipotesis berikut (Cakra, 2017):

$H_0$  : (Random effect model)

$H_1$  : (Fixed effect model)

Dasar penolakan  $H_0$  dengan menggunakan statistik hausman dirumuskan sebagai berikut (Cakra, 2017):

$$X^2(K) = (b-\beta) [\text{Var} (b- \beta)]^{-1} (b- \beta)$$

Keterangan:

b = koefisien random effect

$\beta$  = koefisien fixed effect



Statistik hausman menyebar Chi-Square, jika hasil pengujian nilai  $X^2$  lebih besar dari  $X^2 (K, \alpha)$  tabel atau  $P\text{-Value} < \alpha (0,05)$ , maka  $H_0$  ditolak dan model yang paling baik digunakan yaitu fixed effect model. Jika  $P\text{-Value} > \alpha (0,05)$  maka model yang paling baik digunakan yaitu random effect model (Basuki, 2021).

### 3.8.2.3 Uji lagrange Multiplier

Uji Lagrange Multiplier merupakan tes untuk menentukan apakah model random effect lebih baik daripada model common effect (Manurung, 2012). Dapat dirumuskan hipotesis berikut :

$H_0$  : Model common effect lebih baik dari model random effect

$H_1$  : Model random effect lebih baik dari model common effect

Dasar penolakan  $H_0$  dengan Lagrange Multiplier statistic, dirumuskan (Manurung, 2012):

$$LM = \sqrt{\frac{NT}{2(T-1)}} \left\{ \sum_{i=1}^N \left( \sum_{t=1}^T \frac{eit}{-1} \right)^2 \right.$$

Keteangan :

$N$  = Jumlah individu

$T$  = jumlah periode

$e_{it}$  = residual

Apabila nilai  $LM > \text{Chi-square tabel}$  atau nilai probabilitas  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan model yang paling baik untuk digunakan yaitu random effect model.

### **3.8.3 Uji Asumsi Klasik**

#### **1. Uji Normalitas**

Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah dalam model regresi nilai residual memiliki distribusi normal atau tidak. Menurut Ghozali (2017) terdapat dua cara dalam memprediksi apakah residual memiliki distribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan analisis statistik.

- a. Analisis Grafik Analisis grafik ini salah satu cara termudah untuk mengetahui normalitas dengan melihat histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Dasar pengambilan keputusan dalam analisis ini sebagai berikut:
  - 1) Apabila data menyebar disekitar garis diagonal serta mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya hal ini menunjukkan bahwa pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
  - 2) Apabila data menyebar jauh dari garis diagonal dan ataupun tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram hal ini tidak

menunjukkan bahwa pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Analisis Statistik non-parametrik Uji Kolmogorov-Smirnov (KS)

Dasar pengambilan keputusan dari analisis ini apakah model regresi memenuhi asumsi normalitas sebagai berikut:

- 1) Apabila nilai Sig > alpha maka nilai residual berdistribusi normal.
- 2) Apabila nilai Sig < alpha maka nilai residual berdistribusi tidak normal.

Untuk memeriksa asumsi normalitas yaitu *Jarque-Bera Test* (Cakra, 2017).

Hipotesis Uji Jarque-Bera yaitu:

H<sub>0</sub> : residual data berdistribusi normal

H<sub>1</sub> : residual data tidak berdistribusi normal

$$JB = \frac{N-K}{6} \left( S^2 + \frac{(k-3)^2}{4} \right)$$

Keterangan:

N = jumlah unit cross section

K = jumlah variabel bebas

k = nilai kurtosis residual

S = nilai skewness residual

Kesimpulan H<sub>0</sub> ditolak jika probabilitas  $JB < \alpha$  atau nilai  $JB > X^2(2;\alpha)$

yang berarti residual data berdistribusi tidak normal.

## 2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas ini dimaksudkan untuk menguji apakah terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna antara variabel bebas atau tidak dalam model regresi. Untuk mendeteksi adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen dapat dilakukan dengan beberapa cara salah satunya dengan menggunakan Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) Ghozali (2017).

Beberapa metode yang digunakan untuk mendeteksi multikolinearitas, antara lain (Ariefianto, 2012):

1.  $R^2$  yang tinggi dengan  $> 0,7$  tetapi variabel yang signifikan berjumlah sedikit, dapat diasumsikan bahwa model mengalami multikolinearitas.
2. VIF yang ditampilkan di dalam tabel *Coefficients*. Apabila  $VIF > 10$ , maka dikatakan terjadi multikolinearitas. Apabila  $VIF < 10$ , maka dikatakan tidak ada multikolinearitas antar variabel independen.
3. Korelasi antar variabel independen apabila lebih dari 0,90 maka tidak terjadi multikolinearitas.

### **3. Uji Heterokedastisitas**

Menurut Ghozali (2017) heteroskedastisitas memiliki arti bahwa terdapat varian variabel pada model regresi yang tidak sama. Apabila terjadi sebaliknya varian variabel pada model regresi memiliki nilai yang

sama maka disebut homoskedastitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat menggunakan uji glejser.

Uji glejser mengusulkan untuk meregres nilai *absolute residual* ( $AbsU_i$ ) terhadap variabel independen lainnya dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$|U_i| = \alpha + \beta X_i + u_i$$

Jika koefisien variabel independen  $X_i$  (yaitu  $\beta$ ) signifikan secara statistik, maka mengindikasikan terdapat heterokedastisitas dalam model.

Hipotesis:

$H_0$  = Tidak terjadi gejala heterokedastisitas dalam model regresi

$H_1$  = terjadi gejala heterokedastisitas dalam model regresi

Keputusan yang diambil ialah jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ( $\alpha$ ), maka  $H_0$  diterima. Sebaliknya jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( $\alpha$ ) maka  $H_0$  di tolak.

#### 4. Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2017) uji autokorelasi ini dimaksudkan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu (residual) pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Apabila terjadi korelasi maka terdapat problem autokorelasi. Model regresi yang dianggap baik apabila terlepas dari autokorelasi.

Untuk mendeteksi autokorelasi dapat melalui statistik *Durbin-Watson* (DW), yaitu independensi antar residual. Hasil pengujian statistik

*Durbin-Watson* berupa nilai DW akan dibandingkan dengan nilai statistik *Durbin-Watson* (tabel). Model regresi yang ideal tidak ada autokorelasi antar residual (Astuti, 2019). Aturan penolakan hipotesis null sebagai berikut (Ariefianto, 2012):

$4 - d_L < DW < 4$	; <i>Negative autocorrelation</i>
$4 - d_U < DW < 4 - d_L$	; <i>Indeterminate</i>
$d_U < DW < 4 - d_U$	; <i>No autocorrelation</i>
$d_L < DW < d_U$	; <i>Indeterminate</i>
$0 < DW < d_L$	; <i>Positive autocorrelation</i>

### 3.8.4 Uji Ketepatan Model

#### 1. Uji F

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh secara keseluruhan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2017). Kriteria dari pengujian secara simultan dengan tingkat signifikan  $\alpha=5\%$  ini meliputi:

- 1) Jika nilai signifikansi uji  $F > \alpha$  yaitu 0,05 maka hipotesis nol diterima
- 2) Jika nilai signifikansi uji  $F < \alpha$  yaitu 0,05 maka hipotesis nol ditolak

#### 2. Uji Koefisien Determinasi

Menurut Ghozali (2017) koefisien determinasi bertujuan pada pengukuran seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai  $R^2$  yang kecil memiliki arti bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Terdapat asumsi mengenai koefisien determinasi sebagai berikut: Nilai  $R^2$  berada diantara 0 dan 1 atau ( $0 < R^2 < 1$ ), jadi:

- 1) Nilai  $R^2$  yang mendekati 1 memiliki arti bahwa variabel independen hampir memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen
- 2) Nilai  $R^2$  yang mendekati 0 memiliki arti bahwa kemampuan variabel independen dalam memberikan informasi mengenai variasi variabel dependen amat terbatas.

Secara umum bila tambahan variabel independen merupakan *predictor* yang baik, maka akan menyebabkan nilai variasi naik dan *adjusted R2* meningkat. Sebaliknya jika tambahan variabel baru tidak meningkatkan varians maka *Adjusted R2* akan menurun yang artinya tambahan variabel bukan *predictor* yang baik bagi variabel dependen (Ferdinand, 2014).

### 3.8.5 Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Ghozali (2017) regresi linear berganda ini bertujuan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel terikat. Data dalam penelitian ini di analisis dengan analisis regresi berganda, dengan menggunakan software Eviews dan kemudian dijelaskan secara deskriptif. Persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$KKPD = \alpha + \beta_1 UP + \beta_2 BD + \beta_3 TIKET + \beta_4 TIKEM + \beta_5 LEV + e$$

Keterangan :

KKPD = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

A = Konstanta

$\beta_{1...5}$  = Koefisien Determinasi

UP = Ukuran Pemerintah

BD = Belanja Daerah

TIKET = Tingkat Ketergantungan



TIKEM = Tingkat Kemakmuran

LEV = *Leverage*

e = *Error*

### 3.8.6 Uji Hipotesis

Dalam penelitian pengujian hipotesis menggunakan uji t. Uji t ini bertujuan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel variabel independen lainnya konstan (Ghozali, 2017).

Terdapat beberapa kriteria dalam uji t ini dengan menggunakan tingkat signifikan  $\alpha = 5\%$  sebagai berikut:

1.1 Jika nilai signifikansi uji t  $> 0.05$  maka H0 diterima sedangkan Ha ditolak.

1.2 jika nilai signifikansi uji t  $< 0.05$  maka H0 ditolak sedangkan Ha diterima.

## **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Penelitian ini menganalisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Objek dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah. Data penelitian ini menggunakan data sekunder laporan keuangan pemerintah daerah yang diperoleh dari website resmi pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah.

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun anggaran 2019-2021, yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria yang telah ditetapkan penulis. Berdasarkan kriteria pengambilan sampel ditetapkan sampel dari penelitian ini sebanyak 105 data.

### **4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data**

#### **4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk generalisasi (Kurniawan & Puspitaningtyas, 2016). Jumlah data yang digunakan adalah 105 observasi. Berikut hasil analisis statistik deskriptif :

Tabel 4.1

## Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2	X3	X4	X5
Mean	0.884666	4.786326	1.990534	0.579425	0.431857	0.010489
Median	0.863183	3.821069	1.930601	0.579264	0.368326	0.008277
Maximum	1.060740	21.53366	4.764046	0.781518	2.385945	0.034220
Minimum	0.706069	2.143033	0.798353	0.352448	0.212777	0.000484
Std. Dev.	0.098212	3.210222	0.663923	0.060428	0.318527	0.007023
Skewness	0.041743	3.621168	1.407266	-0.721247	4.730436	1.399871
Kurtosis	1.624082	17.32972	7.550650	7.157432	26.60337	4.783892

Sumber: Data olahan penulis,2023

## A. Variabel Dependen

## 1) Kinerja keuangan pemerintah daerah

Hasil statistik deskriptif pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah (Y) memiliki rata-rata sebesar 0,884666, nilai median sebesar 0,863183, nilai maksimum sebesar 1,060740 pada pemerintah daerah kota Salatiga tahun 2020, nilai minimum sebesar 0,706069 pada pemerintah kabupaten Klaten tahun 2020.

## B. Variabel Independen

## 1) Ukuran pemerintah Daerah

Hasil statistik deskriptif pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah (X1) memiliki rata-rata sebesar 4,786326, nilai median sebesar 3,821069, nilai maksimum sebesar 21,53366 pada pemerintah daerah kota Semarang tahun 2021, nilai minimum sebesar 2,143033 pada pemerintah kabupaten Rembang tahun 2019.

## 2) Belanja daerah

Hasil statistik deskriptif pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa belanja daerah (X2) memiliki rata-rata sebesar 1,990534, nilai median sebesar 1,930601, nilai maksimum sebesar 4,764046 pada pemerintah daerah kota Semarang tahun 2021, nilai minimum sebesar 0,798353 pada pemerintah daerah kota magelang.

3) Tingkat ketergantungan

Hasil statistik deskriptif pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan (X3) memiliki rata-rata sebesar 0,579425, nilai median sebesar 0,579264, nilai maksimum sebesar 0,781518 pada pemerintah daerah kabupaten sragen, nilai minimum sebesar 0,352448 pada pemerintah daerah kota semarang tahun 2021.

4) Tingkat kemakmuran

Hasil statistik deskriptif pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa tingkat kemakmuran (X4) memiliki rata-rata sebesar 0,431857, nilai median sebesar 0,368326, nilai maksimum sebesar 2,385945 pada pemerintah daerah kota semarang tahun 2019, nilai minimum sebesar 0,212777 pada pemerintah daerah kota pekalongan 2019.

5) *Leverage*

Hasil statistik deskriptif pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa *leverage* (X5) memiliki rata-rata sebesar 0,010489, nilai median sebesar 0,008277, nilai maksimum sebesar 0,034220 pada pemrintah daerah kabupaten Rembang 2019, nilai minimum sebesar 0,000484 pada pemerintah daerah kota Magelang 2019.

#### 4.2.2 Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel

##### 1. Uji Chow (*Chow Test*)

Chow test digunakan untuk memilih kedua model antara model common effect dan model fixed effect (Cakra, 2017). Dalam pengujian ini dirumuskan hipotesis berikut (Cakra, 2017):

H0 : (*Common Effect Model*)

H1 : (*Fixed Effect Model*)

Dengan melihat nilai probabilitas F-statistik  $< \alpha$  (0,05), maka H0 ditolak.

Berikut hasil uji chow:

Tabel 4.2

Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	48.786066	(34,65)	0.0000
Cross-section Chi-square	344.174919	34	0.0000

Sumber : output Eviews 10, 2023

Dari tabel diatas, diperoleh nilai probabilitas cross-section F sebesar  $0,0000 < \alpha$  (0,05), maka H0 ditolak berarti model data panel yang dapat digunakan yaitu *Fixed Effect Model* (FEM).

##### 2. Uji Hausman

Uji hausman diformulasikan untuk membantu dalam membuat.pilihan antara model *Fixed Effect* dengan *Random effect* (Wooldridge, 2010). Dalam pengujian ini dirumuskan hipotesis berikut (Caraka, 2017):

H0 : (*Random effect model*)

H1 : (*Fixed effect model*)

Dengan dasar penolakan apabila P-Value  $< \alpha$  (0,05), maka H0 ditolak. Berikut hasil uji hausman:

Tabel 4.3

Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	95.696502	5	0.0000

Sumber: Output Eviews 10, 2023

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai probabilitas *cross-section Chi-Square* sebesar  $0,0000 < \alpha$  (0,05), maka H0 ditolak, H1 diterima berarti model data panel yang dapat digunakan adalah *Fixed Effect Model (FEM)*.

#### 4.2.3 Uji Asumsi Klasik

Terdapat beberapa asumsi utama yang mendasari model regresi linear klasik yang disebut dengan asumsi klasik (Gujarati & Porter, 2009). Asumsi klasik terdiri dari pengujian normalitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas. Model regresi linear disebut model yang baik ketika model memenuhi beberapa asumsi klasik (Purnomo, 2016).

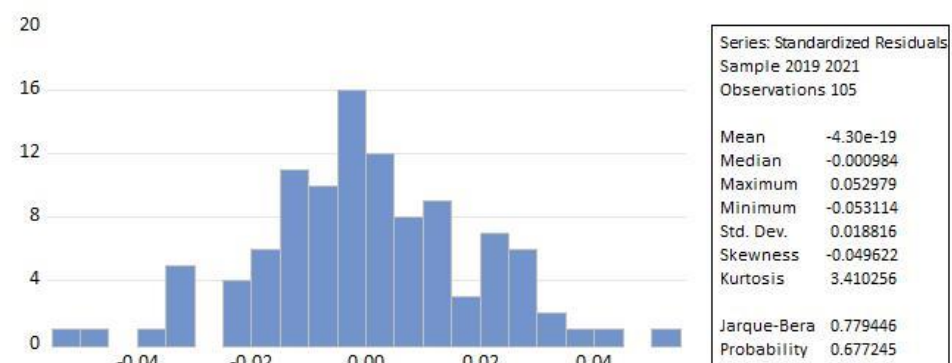
##### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah dalam model regresi nilai residual memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model yang memiliki nilai residual terdistribusi secara normal atau

mendekati normal (Nayebi, 2020). Pada studi ini pengujian normalitas menggunakan *Jarque-Bera Test*, dengan aturan nilai probabilitas *Jarque-Bera* lebih besar dari  $\alpha$  (5% atau 0,05) maka residual berdistribusi normal (Ghozali, 2017). Berikut hasil pengujian normalitas:

Gambar 4.1

### Uji Normalitas



Sumber : Output Eviews 10, 2023

Berdasarkan gambar diatas, hasil uji normalitas menunjukkan nilai Jarque-Bera sebesar 0,779446 dan nilai probabilitas sebesar  $0,677245 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan pada penelitian ini berdistribusi normal.

Dalam sampel besar, hasil pengujian statistik t dan F memiliki distribusi probabilitas t dan F yang mendekati sehingga uji t dan F yang didasarkan pada asumsi residual tidak berdistribusi normal masih dapat diterapkan secara valid (Ghozali, 2017). Sehingga data masih dapat diterapkan secara valid karena termasuk sampel besar.

## 2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas ini dimaksudkan untuk menguji apakah terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna antara variabel bebas atau tidak dalam model regresi (Ghozali, 2017). Mendeteksi multikolinearitas bisa dilakukan dengan beberapa metode, pada studi ini dengan korelasi antar variabel independen apabila kurang dari 0,90 maka tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2017). Berikut hasil pengujian multikolinearitas:

Tabel 4.4

### Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3	X4	X5
X1	1	0.655401	-0.608433	0.893201	-0.271855
X2	0.655401	1	-0.528142	0.778011	-0.101714
X3	-0.608433	-0.528142	1	-0.694389	0.033950
X4	0.893201	0.778011	-0.694389	1	-0.135812
X5	-0.271855	-0.101714	0.033950	-0.135812	1

Sumber: Data olahan penulis, 2023

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa:

- a. Nilai korelasi ukuran pemerintah (X1) terhadap belanja daerah (X2) sebesar  $0,655401 < 0,90$ .
- b. Nilai korelasi ukuran pemerintah (X1) terhadap tingkat ketergantungan (X3) sebesar  $-0,608433 < 0,90$ .
- c. Nilai korelasi ukuran pemerintah (X1) terhadap tingkat kemakmuran (X4) sebesar  $0,893201 < 0,90$ .
- d. Nilai korelasi ukuran pemerintah (X1) terhadap *leverage* (X5) sebesar  $-0,271855 < 0,90$ .



- e. Nilai korelasi belanja daerah (X2) terhadap tingkat ketergantungan (X3) sebesar  $-0,528142 < 0,90$ .
- f. Nilai korelasi belanja daerah (X2) terhadap tingkat kemakmuran (X4) sebesar  $0,778011 < 0,90$ .
- g. Nilai korelasi belanja daerah (X2) terhadap *leverage* (X5) sebesar  $-0,101714 < 0,90$ .
- h. Nilai korelasi tingkat ketergantungan (X3) terhadap tingkat kemakmuran (X4) sebesar  $-0,694389 < 0,90$ .
- i. Nilai korelasi tingkat ketergantungan (X3) terhadap *leverage* (X5) sebesar  $0,033950 < 0,90$ .
- j. Nilai korelasi tingkat kemakmuran (X4) terhadap *leverage* (X5) sebesar  $-0,135812 < 0,90$ .

Dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen mempunyai nilai korelasi kurang dari 0,90 atau  $< 0,90$  maka dapat disimpulkan tidak terjadi masalah multikolinearitas.

### 3. Uji Heterokedastisitas

Menurut Ghozali (2017) heteroskedastisitas memiliki arti bahwa terdapat varian variabel pada model regresi yang tidak sama. Pada penelitian ini model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Berikut hasil pengujian heterokedstisitas:

Tabel 4.5

Dependent Variable: RESABS  
Method: Panel Least Squares  
Date: 05/04/23 Time: 14:21  
Sample: 2019 2021  
Periods included: 3  
Cross-sections included: 35  
Total panel (balanced) observations: 105

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.165995	0.076169	2.179308	0.0329
X1	-0.005718	0.009030	-0.633268	0.5288
X2	0.014391	0.020955	0.686743	0.4947
X3	-0.092540	0.074304	-1.245426	0.2174
X4	-0.026950	0.074125	-0.363579	0.7174
X5	0.277120	0.581730	0.476372	0.6354

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.966464	Mean dependent var	0.104918
Adjusted R-squared	0.946343	S.D. dependent var	0.110014
S.E. of regression	0.025484	Akaike info criterion	-4.219226
Sum squared resid	0.042212	Schwarz criterion	-3.208194
Log likelihood	261.5094	Hannan-Quinn criter.	-3.809536
F-statistic	48.03156	Durbin-Watson stat	2.814466
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Output Eviews, 2023

Pada tabel 4.7 diketahui bahwa probabilitas pada setiap variabel memiliki nilai yang lebih besar dari 0,05 (alpha). Sehingga keputusan yang diambil adalah  $H_0$  diterima, yakni tidak terjadi gejala heterokedastisitas.

#### 4. Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2017) uji autokorelasi ini dimaksudkan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu (residual) pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Untuk mendeteksi autokorelasi dengan pengujian statistik

*Durbin-Watson* (DW), yaitu independensi antar residual. Hasil pengujian statistik *Durbin-Watson* berupa nilai DW akan dibandingkan dengan nilai statistik *Durbin-Watson* (tabel). Model regresi yang ideal tidak ada autokorelasi antar residual (Astuti, 2019). Berikut hasil pengujian autokorelasi:

Tabel 4.6

## Uji Autokorelasi

Durbin-Watson stat	2.037447
--------------------	----------

Sumber : data olahan penulis

Berdasarkan tabel 4.6 bahwa nilai *Durbin Watson* (DW) sebesar 2,0374. Kemudian nilai DW akan dibanding dengan nilai statistik *Durbin-Watson* (tabel). Dari nilai *Durbin Watson* (DW) tabel untuk  $n = 105$  pada  $k = 5$  adalah  $dL$  sebesar 1,5837 dan  $dU$  sebesar 1,7827. Nilai DW sebesar 2,0374 terletak diantara  $dU$  sebesar 1,7827 dan  $4-dU$  sebesar 2,2173. Sehingga menunjukkan tidak terdapat autokorelasi.

#### 4.2.4 Uji Ketetapan Model

##### 1. Uji Statistik F

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh secara keseluruhan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2017). Rumusan hipotesisnya yaitu

H<sub>0</sub>: tidak ada pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap dependen.

H<sub>a</sub>: ada pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap dependen.

Pengambilan keputusan H<sub>0</sub> ditolak jika F-hitung > F-tabel atau probabilitas F-statistik <  $\alpha$  (0,05) maka menunjukkan variabel independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Berikut hasil uji statistik F:

Tabel 4.7

Uji Statistik F

Prob(F-statistic)	0,000000
-------------------	----------

Sumber: Data olahan penulis, 2023

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai probabilitas Fstatistik sebesar  $0,000000 < \alpha$  (0,05), sehingga H<sub>0</sub> ditolak maka variabel ukuran pemerintah daerah, belanja daerah, tingkat ketergantungan, tingkat kemakmuran dan *leverage* berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel kinerja keuangan pemerintah daerah.

## 2. Uji Koefisien Determinasi

Menurut Ghozali (2017) koefisien determinasi bertujuan pada pengukuran seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Untuk melihat berapa besar kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat dapat dilihat menggunakan nilai *adjusted R<sup>2</sup>*, berikut hasil uji regresi :

Tabel 4.8  
Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.963296
Adjusted R-squared	0.941273

Sumber: Olahan data penulis, 2023

Berdasarkan nilai *adjusted R-squared* sebesar 0,9632 atau 96% menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah, belanja daerah, tingkat ketergantungan, tingkat kemandirian, dan *leverage* mampu mempengaruhi dan menjelaskan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 96%, sisanya sebesar 4% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.

### 4.2.5 Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Ghozali (2017) regresi linear berganda ini bertujuan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Pada penelitian ini menggunakan model *Fixed Effect Model* (FEM) diperoleh hasil analisis regresi berikut:

Tabel 4.9

## Hasil Regresi

Variable	Coefficient
C	0.215608
UP	0.021667
BD	0.375839
TIKET	-0.005314
TIKEM	-0.418195
LEV	0.087126

Sumber: Output Eviews 10, 2023

Berdasarkan tabel diatas, maka persamaan regresi yang dihasilkan adalah:

$$KKPD = \alpha + \beta_1 UP + \beta_2 BD + \beta_3 TIKET + \beta_4 TIKEM + \beta_5 LEV + e$$

$$KKPD = 0,215608 + 0,021667UP + 0,375839BD - 0,005314TIKET - 0,418195TIKEM + 0,087126LEV + e$$

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai koefisien regresi masing-masing variabel sebagai berikut,

1. Nilai konstanta sebesar 0,215608 artinya jika variabel independen bernilai konstan maka nilai kinerja keuangan pemerintah daerah akan bernilai 0,215608.
2. Nilai koefisien regresi pada ukuran pemerintah ( $\beta_1$  UP) sebesar 0,021667 yang menunjukkan bahwa setiap penambahan satu satuan ukuran pemerintah, maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan mengalami peningkatan nilai sebesar 0,021667.

3. Nilai koefisien regresi pada belanja daerah ( $\beta_2$  BP) sebesar 0,375839 yang menunjukkan bahwa setiap penambahan satu satuan belanja daerah, maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan mengalami peningkatan nilai sebesar 0,375839.
4. Nilai koefisien regresi pada tingkat ketergantungan ( $\beta_3$  TIKET) sebesar -0,005314 yang menunjukkan bahwa setiap penambahan satu satuan tingkat ketergantungan, maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan mengalami penurunan nilai sebesar 0,005314.
5. Nilai koefisien regresi pada tingkat kemakmuran ( $\beta_4$  TIKEM) sebesar -0,418195 yang menunjukkan bahwa setiap penambahan satu satuan tingkat kemakmuran, maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan mengalami penurunan nilai sebesar -0,418195.
6. Nilai koefisien regresi pada *leverage* ( $\beta_5$  LEV) sebesar 0,087126 yang menunjukkan bahwa setiap penambahan satu satuan *leverage*, maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan mengalami peningkatan nilai sebesar 0,087126.

#### 4.2.6 Uji Hipotesis

##### 1. Uji Statistik t

Uji t ini bertujuan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel variabel independen lainnya konstan (Ghozali, 2017). Rumusan hipotesisnya yaitu

$$H_0 : \alpha_1 = 0$$

Variabel X tidak berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Y.

$H_a : \alpha_1 \neq 0$

Variabel X berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Y.

Pengambilan keputusan  $H_0$  ditolak prob (p-value)  $< \alpha$  (0,05) maka menunjukkan satu variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Berikut hasil uji statistik t:



Tabel 4.10

## Uji Statistik t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.215608	0.071138	3.030866	0.0035
X1	0.021667	0.008434	2.569074	0.0125
X2	0.375839	0.019571	19.20383	0.0000
X3	-0.005314	0.069396	-0.076570	0.9392
X4	-0.418195	0.069229	-6.040771	0.0000
X5	0.087126	0.543304	0.160363	0.8731

Sumber: Output Eviews 10, 2023

Hasil menunjukkan bahwa:

- a. Nilai probabilitas variabel ukuran pemerintah (X1) sebesar  $0,0125 < \alpha$  (0,05), sedangkan nilai koefisien pada variabel X1 sebesar 0,021667 yang bernilai positif. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
- b. Nilai probabilitas variabel belanja daerah (X2) sebesar  $0,0000 < \alpha$  (0,05), sedangkan nilai koefisien pada variabel X2 sebesar 0,375839 yang bernilai positif. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
- c. Nilai probabilitas variabel tingkat ketergantungan (X3) sebesar  $0,9392 > \alpha$  (0,05), sedangkan nilai koefisien pada variabel X3 sebesar -0,005314 yang bernilai negatif. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

- d. Nilai probabilitas variabel tingkat kemakmuran ( $X_4$ ) sebesar  $0,0000 > \alpha$  ( $0,05$ ), sedangkan nilai koefisien pada variabel  $X_4$  sebesar  $-0,418195$  yang bernilai negatif. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemakmuran berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
- e. Nilai probabilitas variabel *leverage* ( $X_5$ ) sebesar  $0,8731 > \alpha$  ( $0,05$ ), sedangkan nilai koefisien pada variabel  $X_5$  sebesar  $0,087126$  yang bernilai positif. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

### **4.3 Pembahasan Hasil Analisis Data**

#### **4.3.1 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan uji data, hasil menjelaskan bahwa variabel ukuran pemerintah daerah memiliki nilai koefisien sebesar  $0,021667$  dan signifikansi  $0,0125$ . Sehingga dengan nilai signifikansi  $0,0125 > \alpha$  ( $0,05$ ) maka  $H_1$  diterima yang berarti ukuran pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Ukuran (size) pemerintah daerah menurut Aziz (2016) menggunakan total aset pemerintah daerah karena aset menunjukkan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan dapat diperoleh. Diharapkan pemerintah daerah yang memiliki ukuran (size) yang

besar untuk lebih mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah tersebut.

Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Aziz (2016); Nugraheni & Adi (2020); Kirana & Sulardi (2020); Riani (2022) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

#### **4.3.2 Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah**

##### **Daerah**

Berdasarkan uji data, hasil menjelaskan bahwa variabel belanja daerah memiliki nilai koefisien sebesar 0,375839 dan signifikansi 0,0000. Sehingga dengan nilai signifikansi  $0,0000 < \alpha (0,05)$  maka H2 diterima yang berarti belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian membuktikan bahwa adanya pengaruh belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dengan total belanja yang besar seharusnya mampu memberikan kinerja yang baik. Karena belanja daerah baik itu yang sifatnya rutin maupun belanja modal dan infrastruktur dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat.

Pengelolaan Belanja menunjukkan jika kegiatan belanja yang terjadi di pemerintahan daerah mempunyai perbandingan antara belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak sebesar dari total pendapatan yang masuk di

anggaran pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat secara optimal menekan biaya realisasi belanja dan belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak lebih besar dari total pendapatannya. Pengaruhnya maka dapat berimplikasi pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Aziz (2016); Rusmita (2019); Anynda & Hermanto (2020); Sari & Halmawati (2021) yang menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

#### **4.3.3 Pengaruh Tingkat Ketergantungan Terhadap Kinerja Keuangan**

##### **Pemerintah Daerah**

Berdasarkan uji data, hasil menjelaskan bahwa variabel tingkat ketergantungan memiliki nilai koefisien sebesar -0,005314 dan signifikansi 0,9392. Sehingga dengan nilai signifikansi  $0,9392 > \alpha (0,05)$  maka H3 ditolak yang berarti tingkat ketergantungan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Bukti dari analisis ini menginterpretasikan bahwa ketergantungan pada pusat tidak mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan dana yang berasal dari pusat hanya merupakan dana tambahan yang diberikan berdasarkan kekurangan dana pemerintah daerah untuk memberikan bantuan dana bagi daerah dan tidak merepresentasikan kinerja pemerintah daerah. Selain itu, dana ini adalah dana tambahan yang diberikan jika daerah membutuhkan dan bukan dana rutin yang akan selalu diberikan

kepada daerah. Daerah akan lebih mengutamakan menggunakan hasil pendapatan daerah itu sendiri untuk membuat APBD diawal periode.

Jadi dapat disimpulkan bahwa besarnya tingkat ketergantungan pemda yang diprosikan dengan dana perimbangan dari pusat tidak dimanfaatkan secara optimal yang berakibat besarnya tingkat ketergantungan pada pusat tidak memberikan pengaruh apapun pada kinerja keuangan pemerintah daerahnya.

Menurut Ernawati dan Jaeni (2018) dalam Aulia & Rahmawaty (2020) dana perimbangan dari pusat sebagian besar justru dipakai untuk belanja rutin aparatur daerah yang mengakibatkan tidak tersedianya dana untuk pelayanan publik dan menyebabkan ketidakefektifan penggunaan dana perimbangan.

Hasil ini konsisten dengan hasil yang dilakukan oleh Nugraheni & Adi (2020); Aulia & Rahmawaty (2020) yang menyatakan bahwa tingkat ketergantungan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

#### **4.3.4 Pengaruh Tingkat Kemakmuran Terhadap Kinerja Keuangan**

##### **Pemerintah Daerah**

Berdasarkan uji data, hasil menjelaskan bahwa variabel tingkat kemakmuran memiliki nilai koefisien sebesar -0,418195 dan signifikansi 0,0000. Sehingga dengan nilai signifikansi  $0,0000 > \alpha (0,05)$  maka H4 diterima yang berarti tingkat kemakmuran berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Artinya jika semakin rendah PAD maka semakin tinggi kinerja keuangan pemerintah daerahnya. Hubungan negatif antara kemakmuran pemda yang dinyatakan dengan PAD dan kinerja keuangan pemda, PAD terendah pada Kota Pekalongan tahun 2019 sebesar 0,212777, PAD yang rendah untuk membiayai kegiatan masyarakatnya. Sedangkan kinerja keuangan pemerintah daerah tertinggi pada Kota Salatiga tahun 2020 sebesar 1,060740, kinerja keuangan pemerintah daerah yang tinggi di dorong dengan sumber pendanaan lainnya.

Ini merupakan salah satu alasan yang menjadikan pemda tidak terdorong untuk menggali potensi-potensi kekayaan yang ada di daerahnya untuk dapat meningkatkan kemakmuran pemerintah daerah dan kinerja keuangannya karena pendanaan untuk kegiatan pemerintah daerah tidak bersumber dari PAD melainkan dana dari pemerintah pusat.

Hasil ini konsiten dengan penelitian yang dilakukan Aulia & Rahmawaty (2020) yang menyatakan bahwa tingkat kemakmuran berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

#### **4.3.5 Pengaruh *Leverage* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah**

##### **Daerah**

Berdasarkan uji data, hasil menjelaskan bahwa variabel *leverage* memiliki nilai koefisien sebesar 0,087126 dan signifikansi 0,8731. Sehingga dengan nilai signifikansi  $0,8731 > \alpha (0,05)$  maka  $H_5$  ditolak yang berarti *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal

ini disebabkan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah tidak memperhatikan tingkat utang dalam memperbaiki kinerja keuangan pemerintah daerahnya.

Sehingga, tidak berpengaruh memiliki arti bahwa dengan adanya perubahan baik itu peningkatan ataupun penurunan, *Leverage* pada pemerintah daerah tidak akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut.

Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2016); Rusmita (2019); Saraswati & Rioni (2019); Salsabilla & Rahayu (2021) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik pemerintah pemerintah daerah Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah tahun anggaran 2019-2021. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
2. Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
3. Tingkat Ketergantungan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
4. Tingkat Kemandirian berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
5. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

#### **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dalam penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Hanya meneliti ketersediaan informasi laporan keuangan pada situs pemerintah Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah.
2. Rentang waktu yang digunakan dalam data penelitian hanya 3 tahun



3. Penelitian ini hanya membatasi pada variabel ukuran pemerintah, belanja daerah, tingkat ketergantungan, tingkat kemakmuran dan *leverage* sementara terdapat beberapa variabel lain.

### **5.3 Saran**

Berdasarkan temuan penelitian ini, maka disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pada penelitian selanjutnya diharapkan memperluas objek penelitian yang akan diteliti.
2. Pada penelitian selanjutnya periode laporan keuangan yang digunakan untuk penelitian sebaiknya di tambah dan harus terkini sehingga lebih mudah diakses dan meminimalisir data tidak lengkap.
3. Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel yang lain agar lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(2), 1080. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v7.i02.p19>
- Anynda, N. S., & Hermanto, S. B. (2020). Pengaruh rasio kemandirian daerah, efektifitas pendapatan asli daerah, dan pengelolaan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–20.
- Ariefianto, M. D. (2012). *Ekonometrika Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan Eviews*. Penerbit Erlangga.
- Armaja, Ibrahim, R., & Aliamin. (2017). Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(2), 168–181.
- Astuti, S. P. (2019). *Modul Praktikum Statistika*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta.
- Aulia, R., & Rahmawaty, R. (2020). Pengaruh Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Dan Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(4), 584–598. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i4.16826>
- Aziz, A. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah ( Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Di Jawa Timur ). *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi Bisnis*. <https://doi.org/10.26533/eksis.v11i1.34>
- Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. In *Penerbit Erlangga*.
- Basuki, A. T. (2021). *Analisis Data Panel Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Dilengkapi Dengan Penggunaan Eviews)*. In PT Rajagrafindo Persada.
- Cakra, R. E. (2017). *Spatial Data Panel*. Wade Group.
- Ferdinand. (2014). *Structural Equation Modeling dalam Penelitian Manajemen Aplikasi Model-Model Rumit dalam Penelitian untuk Skripsi, Tesis dan Desertasi Doktor*. BP Undip Press.
- Ghozali, I. (2017). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika Teori, Konsep, dan*

*Aplikasi dengan EViews 10*. BP Undip.

- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics*. In N. fox (Ed), *Introductory Econometrics : A Practical Approach (5th ed)*. The McGraw-Hill Companies.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 167 ayat 1, (2004).
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (2019). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Corporate Governance: Values, Ethics and Leadership*, 77–132. <https://doi.org/10.4159/9780674274051-006>
- Kirana, A. S., & Sulardi. (2020). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun 2018). *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 8(2), 175–192.
- Kirana, M. N., & Wahyudi, S. (2016). Analisis Pengaruh Corporate Governance dan Leverage terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Kontrol (Studi Kasus pada Perusahaan Wholesale dan Retail Trade yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2014). *Diponegoro Journal of Management*, 5(4), 1–12. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dbr>
- Manurung, A. H. (2012). Model Data Panel. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 69–88.
- Marhawai. (2015). Pengaruh Ukuran Legislatif , Kemakmuran Pemerintah Daerah , Ukuran Pemerintah Daerah dan Intergovernmental Revenue terhadap Kinerja Keuangan PemerinAkuntansi, Magister Pascasarjana, Progratah Daerah ( Studi Pada Kabupaten / Kota Di Aceh Tahun 2010 s . d 2. *Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi*, 8(1), 49–58.
- Mulyani, S., & Wibowo, H. (2017). Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah,Tahun 2012-2015). *Kompartemen*, XV(1), 57–66.
- Natoen, A., Febrianti, A., Sarikadarwati, & Ardiani, S. (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintahan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2013-2017. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 3(2), 106–117.
- Nugraheni, E., & Adi, P. H. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Meta-Analisis. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(1), 19–42.

<https://doi.org/10.25105/mraai.v20i1.4398>

Nugroho, T. R., & Prasetyo, novi E. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten & Kota Di Jawa Timur. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 7(1), 27. <https://doi.org/10.25273/jap.v7i1.1823>

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, (2014).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, (2019).

Primadiva, P. P., Rosdini, D., & Mulyani, S. (2021). Pengaruh tingkat kekayaan dan tingkat ketergantungan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(2), 299–310. <https://doi.org/10.22437/jpe.v16i2.11999>

Putri, R. A. R., & Amanah, L. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, Vol.9, No.

Riani, D., & H, J. P. R. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Leverage, Ukuran Pemerintahan, dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Audit Dan Perpajakan Indonesia (JAAPI)*, 3(1). <http://118.97.35.230/lemlit/jtt/250.pdf>

Rusmita, S. (2019). Effect of Regional Government Characteristics of Financial Performance. *International Research in Economics and Finance*, 3(2), 29. <https://doi.org/10.20849/iref.v3i2.703>

Salsabilla, S., & Rahayu, S. (2021). Pengaruh Welth , Leverage Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah ( Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2019 ). *E-Proceeding of Management*, 8(6), 8479–8487.

Saraswati, D., & Rioni, Y. S. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 9(2), 110–120.

Sari, B. I., & Halmawati. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i1.356>

Sari, I. P. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Daerah. *JOM Fekon*, 4(1), 679–692.

Sari, N. M. D. P., & Mustanda, I. K. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(8), 4759. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i08.p02>

Sedyaningsih, P. (2015). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten di Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2012). *Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya*.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis*. ALFABETA.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. ALFABETA.

Sugiyono. (2018a). *Metode Penelitian Kuantitatif* (Cet. 1). Alfabeta.

Sugiyono, P. D. (2018b). *Metode Penelitian Kuantitatif*. ALFABETA.

Sumarjo, H. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Surakarta: Pascasarjana UNS*.

pasal 156 ayat (1) Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, (2004).

Weill, L. (2003). Leverage and corporate performance: a frontier efficiency analysis on european countries. *Working Paper*.

Wekke, I. S., Sutriani, E., & Octaviani, R. (2019). *Metode Penelitian Ekonomi Syariah*. Gawe Buku.

Wooldridge, J. M. (2010). *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data*. In Veronica Forrest-Thompson and Language Poetry (second). The MIT Press.

[www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)

[www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

[www.jatengprov.go.id](http://www.jatengprov.go.id)

[www.ppid.jatengprov.go.id](http://www.ppid.jatengprov.go.id)

## LAMPIRAN

### Lampiran 1: Data Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah

No.	KAB/KOTA
1	KAB. BANJARNEGARA
2	KAB. BANYUMAS
3	KAB. BATANG
4	KAB. BLORA
5	KAB. BOYOLALI
6	KAB. BREBES
7	KAB. CILACAP
8	KAB. DEMAK
9	KAB. GROBOGAN
10	KAB. JEPARA
11	KAB. KARANGANYAR
12	KAB. KEBUMEN
13	KAB. KENDAL
14	KAB. KLATEN
15	KAB. KUDUS
16	KAB. MAGELANG
17	KAB. PATI
18	KAB. PEKALONGAN
19	KAB. PEMALANG
20	KAB. PURBALINGGA
21	KAB. PURWOREJO
22	KAB. REMBANG
23	KAB. SEMARANG

24	KAB. SRAGEN
25	KAB. SUKOHARJO
26	KAB. TEGAL
27	KAB. TEMANGGUNG
28	KAB. WONOGIRI
29	KAB. WONOSOBO
30	KOTA MAGELANG
31	KOTA PEKALONGAN
32	KOTA SALATIGA
33	KOTA SEMARANG
34	KOTA SURAKARTA
35	KOTA TEGAL

**Lampiran 2: Tabulasi Data Variabel**

No.	KAB/KOTA	Tahun	Y	X1	X2	X3	X4	X5
1	KAB. BANJARNEGARA	2019	1.008093	4.469371	2.123034	0.641063	0.257701	0.006280
2	KAB. BANJARNEGARA	2020	1.018013	4.528920	2.030532	0.620710	0.238639	0.004783
3	KAB. BANJARNEGARA	2021	0.978911	4.611185	2.042019	0.600067	0.313783	0.005299
4	KAB. BANYUMAS	2019	0.815360	6.226652	2.800700	0.564889	0.686806	0.007772
5	KAB. BANYUMAS	2020	0.806704	6.540516	2.686475	0.556814	0.668211	0.008285
6	KAB. BANYUMAS	2021	0.804275	7.258283	2.805089	0.538746	0.761991	0.032141
7	KAB. BATANG	2019	0.808513	2.664374	1.431034	0.652509	0.245836	0.023775
8	KAB. BATANG	2020	0.778710	2.909762	1.349573	0.582118	0.257423	0.022935
9	KAB. BATANG	2021	0.790602	3.035062	1.440337	0.586227	0.322789	0.017791
10	KAB. BLORA	2019	0.979753	3.362563	2.195598	0.643345	0.246863	0.011475
11	KAB. BLORA	2020	1.002256	3.382902	2.132749	0.591762	0.299688	0.008287
12	KAB. BLORA	2021	0.946273	3.536211	2.107411	0.631540	0.326770	0.010133
13	KAB. BOYOLALI	2019	1.010229	3.770144	2.381602	0.609392	0.395432	0.006923
14	KAB. BOYOLALI	2020	0.982120	4.227691	2.339806	0.569330	0.451544	0.007398
15	KAB. BOYOLALI	2021	0.933452	4.658597	2.268509	0.575656	0.514970	0.006372
16	KAB. BREBES	2019	0.797996	4.187463	2.471257	0.605813	0.379091	0.018516
17	KAB. BREBES	2020	0.751251	3.799203	2.260042	0.567842	0.392542	0.016658
18	KAB. BREBES	2021	0.988643	3.888838	3.126226	0.544748	0.518511	0.006992
19	KAB. CILACAP	2019	0.846759	5.735056	2.779740	0.549005	0.574277	0.008091
20	KAB. CILACAP	2020	0.827223	6.047267	2.607739	0.557540	0.591344	0.005271
21	KAB. CILACAP	2021	0.998655	6.345078	3.329815	0.536173	0.739134	0.010176
22	KAB. DEMAK	2019	0.804181	5.450473	1.899488	0.539377	0.407401	0.004401



23	KAB. DEMAK	2020	0.792354	5.697121	1.849147	0.506075	0.439694	0.002849
24	KAB. DEMAK	2021	0.802720	5.914643	1.898630	0.520389	0.445010	0.005955
25	KAB. GROBOGAN	2019	0.988297	3.642816	2.551227	0.718011	0.344559	0.027433
26	KAB. GROBOGAN	2020	0.993034	3.771023	2.511269	0.571113	0.350454	0.027498
27	KAB. GROBOGAN	2021	0.921721	4.133213	2.428632	0.572643	0.424186	0.006282
28	KAB. JEPARA	2019	0.797473	6.496680	1.924959	0.577157	0.384979	0.008277
29	KAB. JEPARA	2020	0.979607	6.626878	2.268046	0.552899	0.419363	0.007334
30	KAB. JEPARA	2021	0.970056	6.674428	2.309409	0.572510	0.408635	0.006808
31	KAB. KARANGANYAR	2019	0.873581	3.476943	1.903890	0.623454	0.387763	0.022794
32	KAB. KARANGANYAR	2020	0.825177	4.422303	1.750520	0.588203	0.384683	0.013683
33	KAB. KARANGANYAR	2021	0.830844	4.882484	1.799595	0.584140	0.426650	0.014444
34	KAB. KEBUMEN	2019	0.797066	4.482324	2.246525	0.599038	0.409163	0.006289
35	KAB. KEBUMEN	2020	0.990820	4.525738	2.737862	0.587800	0.403026	0.009320
36	KAB. KEBUMEN	2021	0.981570	4.678347	2.779841	0.567648	0.472017	0.013869
37	KAB. KLATEN	2019	0.713144	4.157399	1.917895	0.619507	0.311648	0.003465
38	KAB. KLATEN	2020	0.706069	3.566778	1.820343	0.610348	0.315304	0.005887
39	KAB. KLATEN	2021	0.708409	3.515211	1.820638	0.748399	0.329963	0.002377
40	KAB. KUDUS	2019	0.863183	4.468531	1.804424	0.637759	0.343824	0.010331
41	KAB. KUDUS	2020	0.815516	4.670496	1.644224	0.587047	0.383893	0.008535
42	KAB. KUDUS	2021	0.751194	4.850177	1.625310	0.573059	0.507167	0.006966
43	KAB. MAGELANG	2019	0.997342	3.270629	2.568594	0.564099	0.417178	0.004198
44	KAB. MAGELANG	2020	0.931125	3.429578	2.216503	0.559352	0.329769	0.006191
45	KAB. MAGELANG	2021	0.977084	3.597390	2.412914	0.558201	0.375378	0.010399

46	KAB. PATI	2019	0.759669	6.439755	2.156609	0.576798	0.363997	0.002480
47	KAB. PATI	2020	0.771624	6.254898	2.054352	0.565308	0.371708	0.002806
48	KAB. PATI	2021	0.717729	6.356447	1.955956	0.557531	0.388645	0.006477
49	KAB. PEKALONGAN	2019	0.820792	3.020681	1.791600	0.605631	0.341344	0.009391
50	KAB. PEKALONGAN	2020	0.995741	3.066065	2.053018	0.585370	0.341901	0.018051
51	KAB. PEKALONGAN	2021	0.998316	3.140698	2.075043	0.581194	0.346599	0.006432
52	KAB. PEMALANG	2019	0.797426	3.679973	2.102045	0.606393	0.350559	0.007630
53	KAB. PEMALANG	2020	0.892127	3.705954	2.184827	0.603655	0.328375	0.013087
54	KAB. PEMALANG	2021	0.829881	3.889678	2.026617	0.634551	0.365394	0.015974
55	KAB. PURBALINGGA	2019	0.818663	2.846329	1.700082	0.612388	0.305997	0.008626
56	KAB. PURBALINGGA	2020	0.768362	2.769994	1.500419	0.586048	0.313619	0.014967
57	KAB. PURBALINGGA	2021	0.781849	2.857441	1.606578	0.574862	0.377882	0.013278
58	KAB. PURWOREJO	2019	1.006376	2.987232	2.186289	0.594922	0.280396	0.009457
59	KAB. PURWOREJO	2020	0.981352	3.094417	2.126471	0.565476	0.304786	0.011837
60	KAB. PURWOREJO	2021	0.932424	3.303359	2.135478	0.554296	0.438265	0.012484
61	KAB. REMBANG	2019	0.803505	2.143033	1.463905	0.577399	0.308445	0.034220
62	KAB. REMBANG	2020	0.759099	2.346462	1.425835	0.538965	0.326670	0.023268
63	KAB. REMBANG	2021	0.960820	2.504076	1.836443	0.539641	0.404101	0.012225
64	KAB. SEMARANG	2019	0.859920	4.689787	1.987403	0.584597	0.429011	0.007889
65	KAB. SEMARANG	2020	0.841472	4.888861	1.860725	0.560980	0.442528	0.008113
66	KAB. SEMARANG	2021	0.776652	5.297045	1.877389	0.523014	0.575748	0.013947
67	KAB. SRAGEN	2019	0.749503	3.941848	1.724475	0.470834	0.368326	0.032045
68	KAB. SRAGEN	2020	0.806512	4.087578	1.784669	0.781518	0.394465	0.009272

69	KAB. SRAGEN	2021	0.924658	4.223594	2.160000	0.450132	0.368326	0.008141
70	KAB. SUKOHARJO	2019	0.828548	5.194655	1.776147	0.579264	0.458742	0.004488
71	KAB. SUKOHARJO	2020	0.846801	5.674970	1.727809	0.570295	0.469541	0.004907
72	KAB. SUKOHARJO	2021	0.828904	6.298329	1.756972	0.543046	0.528354	0.006621
73	KAB. TEGAL	2019	0.802149	3.377567	2.210463	0.575781	0.436003	0.010549
74	KAB. TEGAL	2020	0.758311	3.604541	2.010869	0.463291	0.439932	0.011009
75	KAB. TEGAL	2021	0.798290	3.819895	2.285152	0.452026	0.591004	0.012024
76	KAB. TEMANGGUNG	2019	0.777256	3.240097	1.459985	0.603309	0.278314	0.017009
77	KAB. TEMANGGUNG	2020	0.746603	3.184698	1.366918	0.571630	0.307488	0.014889
78	KAB. TEMANGGUNG	2021	0.952797	3.420436	1.877969	0.561896	0.363128	0.020130
79	KAB. WONOGIRI	2019	0.852628	3.740376	2.082697	0.652750	0.287222	0.006939
80	KAB. WONOGIRI	2020	0.836825	3.821069	1.902672	0.638459	0.274293	0.007750
81	KAB. WONOGIRI	2021	0.838093	3.911949	1.930601	0.645435	0.241300	0.008502
82	KAB. WONOSOBO	2019	0.874997	3.390531	1.713764	0.631352	0.238372	0.002119
83	KAB. WONOSOBO	2020	0.817942	3.441342	1.536909	0.597717	0.251724	0.004444
84	KAB. WONOSOBO	2021	0.945277	3.761877	1.860098	0.584717	0.339746	0.015186
85	KAB. KENDAL	2019	0.878353	3.026909	1.957308	0.620861	0.350501	0.007701
86	KAB. KENDAL	2020	0.771782	3.130780	1.645015	0.576387	0.356754	0.015597
87	KAB. KENDAL	2021	0.899769	3.626991	2.069958	0.562459	0.439198	0.007015
88	KOTA MAGELANG	2019	1.027706	4.012817	0.994599	0.593209	0.273583	0.000484
89	KOTA MAGELANG	2020	0.843757	4.160263	0.798353	0.616155	0.290757	0.000595
90	KOTA MAGELANG	2021	0.940345	4.337394	0.935048	0.597472	0.319391	0.000612
91	KOTA PEKALONGAN	2019	0.981527	2.856674	0.953675	0.628156	0.212777	0.009129

92	KOTA PEKALONGAN	2020	0.991276	2.921917	0.944840	0.656416	0.229868	0.006087
93	KOTA PEKALONGAN	2021	0.995570	3.048942	0.962092	0.628986	0.252037	0.007369
94	KOTA SALATIGA	2019	1.015122	3.122697	0.942054	0.613515	0.236087	0.006060
95	KOTA SALATIGA	2020	1.060740	3.072156	0.944296	0.586417	0.219539	0.011375
96	KOTA SALATIGA	2021	1.010897	3.200392	0.956501	0.564628	0.280685	0.010000
97	KOTA SEMARANG	2019	1.015025	18.159414	4.633934	0.380792	2.066333	0.004172
98	KOTA SEMARANG	2020	0.938282	21.003912	4.128913	0.379298	2.024538	0.005321
99	KOTA SEMARANG	2021	0.987800	21.533658	4.764046	0.352448	2.385945	0.005380
100	KOTA SURAKARTA	2019	1.033742	11.719106	2.011614	0.570584	0.546020	0.005068
101	KOTA SURAKARTA	2020	0.894801	12.135932	1.638666	0.570694	0.492776	0.006719
102	KOTA SURAKARTA	2021	0.962474	12.714848	1.866496	0.545006	0.560580	0.003766
103	KOTA TEGAL	2019	1.008622	2.417613	1.045905	0.618809	0.285576	0.013707
104	KOTA TEGAL	2020	1.030151	2.396957	1.048606	0.612130	0.266581	0.018762
105	KOTA TEGAL	2021	1.056954	3.429987	1.089706	0.599227	0.308117	0.026874

### Lampiran 3: Uji Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2	X3	X4	X5
Mean	0.884666	4.786326	1.990534	0.579425	0.431857	0.010489
Median	0.863183	3.821069	1.930601	0.579264	0.368326	0.008277
Maximum	1.060740	21.53366	4.764046	0.781518	2.385945	0.034220
Minimum	0.706069	2.143033	0.798353	0.352448	0.212777	0.000484
Std. Dev.	0.098212	3.210222	0.663923	0.060428	0.318527	0.007023
Skewness	0.041743	3.621168	1.407266	-0.721247	4.730436	1.399871
Kurtosis	1.624082	17.32972	7.550650	7.157432	26.60337	4.783892
Jarque-Bera	8.313026	1127.841	125.2563	84.72202	2828.994	48.21612
Probability	0.015662	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Sum	92.88995	502.5643	209.0061	60.83964	45.34495	1.101396
Sum Sq. Dev.	1.003146	1071.774	45.84254	0.379764	10.55179	0.005130
Observations	105	105	105	105	105	105

#### Lampiran 4: Hasil Uji Pemilihan Model

Hasil Uji *Common Effect Model* (CEM)

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 04/15/23 Time: 15:20

Sample: 2019 2021

Periods included: 3

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 105

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.781322	0.149351	5.231451	0.0000
X1	0.003809	0.007247	0.525650	0.6003
X2	0.019229	0.023612	0.814406	0.4174
X3	0.111093	0.224860	0.494055	0.6224
X4	-0.022257	0.090602	-0.245658	0.8065
X5	-0.755343	1.492785	-0.505996	0.6140
R-squared	0.026646	Mean dependent var	0.884666	
Adjusted R-squared	-0.022513	S.D. dependent var	0.098212	
S.E. of regression	0.099312	Akaike info criterion	-1.725664	
Sum squared resid	0.976416	Schwarz criterion	-1.574009	
Log likelihood	96.59737	Hannan-Quinn criter.	-1.664211	
F-statistic	0.542031	Durbin-Watson stat	0.686256	
Prob(F-statistic)	0.743991			

Hasil Uji *Fixed Effect Model* (FEM)

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 04/15/23 Time: 15:25

Sample: 2019 2021

Periods included: 3

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 105

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.215608	0.071138	3.030866	0.0035
X1	0.021667	0.008434	2.569074	0.0125
X2	0.375839	0.019571	19.20383	0.0000
X3	-0.005314	0.069396	-0.076570	0.9392
X4	-0.418195	0.069229	-6.040771	0.0000
X5	0.087126	0.543304	0.160363	0.8731

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.963296	Mean dependent var	0.884666
Adjusted R-squared	0.941273	S.D. dependent var	0.098212
S.E. of regression	0.023800	Akaike info criterion	-4.355902
Sum squared resid	0.036820	Schwarz criterion	-3.344869
Log likelihood	268.6848	Hannan-Quinn criter.	-3.946211
F-statistic	43.74138	Durbin-Watson stat	3.183952
Prob(F-statistic)	0.000000		

Hasil Uji *Random Effect Model* (REM)

Dependent Variable: Y

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 04/15/23 Time: 15:28

Sample: 2019 2021

Periods included: 3

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 105

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.483194	0.058521	8.256822	0.0000
X1	0.001738	0.005923	0.293493	0.7698
X2	0.286583	0.017108	16.75098	0.0000
X3	-0.045750	0.068185	-0.670977	0.5038
X4	-0.345189	0.061910	-5.575691	0.0000
X5	-0.163961	0.532352	-0.307994	0.7587

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.089049	0.9333
Idiosyncratic random		0.023800	0.0667

Weighted Statistics			
R-squared	0.616600	Mean dependent var	0.134916
Adjusted R-squared	0.597237	S.D. dependent var	0.051912
S.E. of regression	0.032945	Sum squared resid	0.107455
F-statistic	31.84324	Durbin-Watson stat	1.382769
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	-1.406977	Mean dependent var	0.884666
Sum squared resid	2.414548	Durbin-Watson stat	0.061537



### Lampiran 5: Pemilihan Model Regresi Data Panel

Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: FEM

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	48.786066	(34,65)	0.0000
Cross-section Chi-square	344.174919	34	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 04/12/23 Time: 10:15

Sample: 2019 2021

Periods included: 3

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 105

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.781322	0.149351	5.231451	0.0000
X1	0.003809	0.007247	0.525650	0.6003
X2	0.019229	0.023612	0.814406	0.4174
X3	0.111093	0.224860	0.494055	0.6224
X4	-0.022257	0.090602	-0.245658	0.8065
X5	-0.755343	1.492785	-0.505996	0.6140
R-squared	0.026646	Mean dependent var	0.884666	
Adjusted R-squared	-0.022513	S.D. dependent var	0.098212	
S.E. of regression	0.099312	Akaike info criterion	-1.725664	
Sum squared resid	0.976416	Schwarz criterion	-1.574009	
Log likelihood	96.59737	Hannan-Quinn criter.	-1.664211	
F-statistic	0.542031	Durbin-Watson stat	0.686256	
Prob(F-statistic)	0.743991			

## Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: REM

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	95.696502	5	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1	0.021667	0.001738	0.000036	0.0009
X2	0.375839	0.286583	0.000090	0.0000
X3	-0.005314	-0.045750	0.000167	0.0017
X4	-0.418195	-0.345189	0.000960	0.0184
X5	0.087126	-0.163961	0.011781	0.0207

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 04/12/23 Time: 10:36

Sample: 2019 2021

Periods included: 3

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 105

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.215608	0.071138	3.030866	0.0035
X1	0.021667	0.008434	2.569074	0.0125
X2	0.375839	0.019571	19.20383	0.0000
X3	-0.005314	0.069396	-0.076570	0.9392
X4	-0.418195	0.069229	-6.040771	0.0000
X5	0.087126	0.543304	0.160363	0.8731

## Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.963296	Mean dependent var	0.884666
Adjusted R-squared	0.941273	S.D. dependent var	0.098212

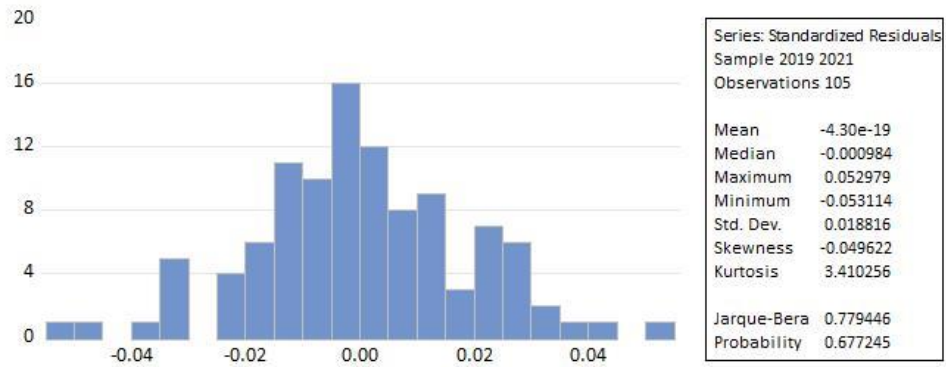
S.E. of regression	0.023800	Akaike info criterion	-4.355902
Sum squared resid	0.036820	Schwarz criterion	-3.344869
Log likelihood	268.6848	Hannan-Quinn criter.	-3.946211
F-statistic	43.74138	Durbin-Watson stat	3.183952
Prob(F-statistic)	0.000000		

---

---

## Lampiran 6: Asumsi Klasik

### Uji Normalitas



### Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3	X4	X5
X1	1	0.655401	-0.608433	0.893201	-0.271855
X2	0.655401	1	-0.528142	0.778011	-0.101714
X3	-0.608433	-0.528142	1	-0.694389	0.033950
X4	0.893201	0.778011	-0.694389	1	-0.135812
X5	-0.271855	-0.101714	0.033950	-0.135812	1

## Uji Heterokedastisitas

Dependent Variable: RESABS

Method: Panel Least Squares

Date: 05/04/23 Time: 14:21

Sample: 2019 2021

Periods included: 3

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 105

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.165995	0.076169	2.179308	0.0329
X1	-0.005718	0.009030	-0.633268	0.5288
X2	0.014391	0.020955	0.686743	0.4947
X3	-0.092540	0.074304	-1.245426	0.2174
X4	-0.026950	0.074125	-0.363579	0.7174
X5	0.277120	0.581730	0.476372	0.6354

### Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.966464	Mean dependent var	0.104918
Adjusted R-squared	0.946343	S.D. dependent var	0.110014
S.E. of regression	0.025484	Akaike info criterion	-4.219226
Sum squared resid	0.042212	Schwarz criterion	-3.208194
Log likelihood	261.5094	Hannan-Quinn criter.	-3.809536
F-statistic	48.03156	Durbin-Watson stat	2.814466
Prob(F-statistic)	0.000000		

## Uji Autokorelasi

Dependent Variable:  $Y-0.686*Y(-1)$ 

Method: Panel Least Squares

Date: 05/12/23 Time: 12:02

Sample (adjusted): 2020 2021

Periods included: 2

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 70

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.366610	2.079571	-0.176291	0.8606
X1-0.314*X1(-1)	-0.002659	0.007934	-0.335087	0.7387
X2-0.314*X2(-1)	0.106435	0.026200	4.062399	0.0001
X3-0.314*X3(-1)	-0.032479	0.172964	-0.187779	0.8516
X4-0.314*X4(-1)	-0.130034	0.095604	-1.360125	0.1786
X5-0.314*X5(-1)	0.564659	2.048634	0.275627	0.7837
R-squared	0.226280	Mean dependent var		0.285434
Adjusted R-squared	0.165833	S.D. dependent var		0.075132
S.E. of regression	0.068620	Akaike info criterion		-2.438635
Sum squared resid	0.301361	Schwarz criterion		-2.245907
Log likelihood	91.35224	Hannan-Quinn criter.		-2.362081
F-statistic	3.743445	Durbin-Watson stat		2.037447
Prob(F-statistic)	0.004912			

## Lampiran 7: Uji Analisis Regresi dan Uji Hipotesis

Hasil Uji *Fixed Effect Model* (FEM)

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 04/15/23 Time: 15:25

Sample: 2019 2021

Periods included: 3

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 105

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.215608	0.071138	3.030866	0.0035
X1	0.021667	0.008434	2.569074	0.0125
X2	0.375839	0.019571	19.20383	0.0000
X3	-0.005314	0.069396	-0.076570	0.9392
X4	-0.418195	0.069229	-6.040771	0.0000
X5	0.087126	0.543304	0.160363	0.8731

### Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.963296	Mean dependent var	0.884666
Adjusted R-squared	0.941273	S.D. dependent var	0.098212
S.E. of regression	0.023800	Akaike info criterion	-4.355902
Sum squared resid	0.036820	Schwarz criterion	-3.344869
Log likelihood	268.6848	Hannan-Quinn criter.	-3.946211
F-statistic	43.74138	Durbin-Watson stat	3.183952
Prob(F-statistic)	0.000000		

**Lampiran 8: Jadwal Penelitian**

No	Bulan	April				Mei				Juni				Juli				Agustus				Septemb er			
		Kegiatan	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
1	Penyusunan proposal	X	X	x	X	X	X	X	X	x	x	x	x												
2	Konsultasi	X																							X
3	Revisi proposal																								
4	Pendaftaran semprof																								
5	Seminar proposal																								
6	Pengumpulan data																								
7	Analisis data																								
8	Penulisan akhir skripsi																								
9	Pendaftaran munaqosah																								
10	Revisi skripsi																								

No	Bulan	Oktober				Novemb er				Des-Jan				Februari				Maret				April			
		Kegiatan	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
1	Penyusunan proposal																								
2	Konsultasi																								
3	Revisi proposal	x	x	x																					
4	Pendaftaran semprof				x																				
5	Seminar proposal						x																		
6	Pengumpulan data																x								
7	Analisis data																	x							





## Lampiran 9 : Nilai Hasil Cek Plagiasi

Turnitin\_Linda Kusumaningtyas\_185221127\_AKS\_Skripsi (1)

ORIGINALITY REPORT

**21** %      21%      10%      9%  
SIMILARITY INDEX      INTERNET SOURCES      PUBLICATIONS      STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://eprints.iain-surakarta.ac.id">eprints.iain-surakarta.ac.id</a> Internet Source	12%
2	<a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://repositori.unsil.ac.id">repositori.unsil.ac.id</a> Internet Source	1%
4	Submitted to Universitas Khairun Student Paper	1%
5	<a href="http://eprints.ums.ac.id">eprints.ums.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://adoc.pub">adoc.pub</a> Internet Source	1%
7	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	1%
8	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	<1%
9	<a href="http://eprints.polsri.ac.id">eprints.polsri.ac.id</a> Internet Source	<1%

10	<a href="http://repo.uinsatu.ac.id">repo.uinsatu.ac.id</a> Internet Source	<1%
11	<a href="http://eprints.umm.ac.id">eprints.umm.ac.id</a> Internet Source	<1%
12	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	<1%
13	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Student Paper	<1%
14	<a href="http://repository.untar.ac.id">repository.untar.ac.id</a> Internet Source	<1%
15	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	<1%

Exclude quotes  On      Exclude matches  < 20 words  
Exclude bibliography  On

**Lampiran 10****DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Linda Kusumaningtyas  
Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 27 Januari 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Tempurrejo, Rt.07/Rw.02, Kedunggudel, Widodaren,  
Ngawi, Jawa Timur.  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Akuntansi Syariah  
No. HP : 082257017457  
Email : [lindanda2711@gmail.com](mailto:lindanda2711@gmail.com)

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. TK Aisyiyah Tempurrejo (2004-2005)
2. MIM Tempurrejo (2006-2012)
3. MTS NDM Surakarta (2012-2015)
4. MAN 4 Ngawi (2015-2018)